

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
TAHUN 2019**



**BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN OKU SELATAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
TAHUN 2019**

Katalog	: -
ISBN	: -
Nomor Publikasi	: -
Ukuran Buku	: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: x + 90 halaman
Naskah	: Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan
Penyunting	: Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan
Diterbitkan Oleh	: Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur selalu senantiasa diungkapkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat-Nya maka penyusunan "**Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPPKD) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan gambaran mengenai pelaksanaan dan hasil kinerja penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh yang disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang telah dibentuk. Laporan ini menyangkut beberapa aspek pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, baik dari kebijakan, program dan kegiatan maupun hal-hal yang telah dicapai serta permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, setiap masukan, kritik maupun saran akan diterima dan akan dipergunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga kerja keras Kita dapat memberikan manfaat bagi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Muaradua, Oktober 2020

**Kepala Bappeda Litbang
Selaku Sekretaris TKPK Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,**



NATALION, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197812251997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN OKU SELATAN	11
2.1. Gambaran Umum Kabupaten OKU Selatan	11
2.2. Perkembangan Kondisi Kemiskinan	20
2.2.1. Tingkat Kemiskinan	20
2.2.2. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)	24
2.3. Perkembangan Dimensi Kemiskinan	28
2.3.1. Bidang Ketenagakerjaan	28
2.3.2. Bidang Kesehatan	30
2.3.3. Bidang Pendidikan	35
2.3.4. Bidang Infrastruktur Dasar.....	39
2.3.5. Bidang Ekonomi	44
2.4. Diagnosis Kemiskinan dan Dimensinya	47

BAB III	PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN	49
3.1.	Prioritas Bidang Ketenagakerjaan.....	49
3.2.	Prioritas Bidang Kesehatan.....	50
3.3.	Prioritas Bidang Pendidikan	52
3.4.	Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	53
3.5.	Prioritas Bidang Ekonomi.....	55
BAB IV	KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH.....	57
4.1.	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	57
4.2.	Strategi Penanggulangan Kemiskinan	58
4.2.1.	Memperbaiki Program Perlindungan Sosial	60
4.2.2.	Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar	61
4.2.3.	Memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin	63
4.2.4.	Pembangunan yang Inklusif	64
4.3.	Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.....	66
4.4.	Inovasi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan	73
BAB V	KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	75
5.1.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.....	75
5.1.1.	Koordinasi di Tingkat Daerah	78
5.1.2.	Koordinasi dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat.....	78
5.1.3.	Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.....	79

5.2. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan.....	80
5.2.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	
Berbasis Rumah Tangga.....	80
5.2.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis	
Komunitas	81
5.2.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis	
Usaha Mikro dan Kecil.....	81
5.2.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk	
Meningkatkan Akses Palayanan Dasar (Perluasan	
Program Pro Rakyat)	81
5.2.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah	82
5.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	82
5.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.....	82
5.5. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program	
Penanggulangan Kemiskinan	83
 BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN REKOMENDASI	85
6.1. Kondisi Tingkat Kemiskinan.....	85
6.2. Diagnosis Permasalahan: Kemiskinan dan Dimensinya	85
6.3. Prioritas Bidang Intervensi	86
6.4. Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian	87
6.5. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	14
Tabel 2.2.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019.....	15
Tabel 2.3.	Perkembangan PDRB di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010–2019	18
Tabel 2.4.	Distribusi PDRB Kabupaten OKU Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)	19
Tabel 2.5.	Tingkat Kemiskinan Menurut Bank Dunia	23
Tabel 2.6.	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019	31
Tabel 2.7.	Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010 – 2019	35
Tabel 2.8.	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	36
Tabel 2.9.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten OKU Selatan Tahun 2012 – 2019	46
Tabel 2.10.	Analisa Prioritas Sasaran Bidang Penanggulangan Kemiskinan.....	47
Tabel 4.1.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan PKH di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	69

Tabel 4.2.	Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	70
Tabel 4.3.	Penerima Bantuan Tunai untuk Orang dengan Kecacatan (ODK) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	72
Tabel 4.4.	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah (Rumah Layak Huni) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta wilayah Kabupaten OKU Selatan	13
Gambar 2.2.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011 – 2019	17
Gambar 2.3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (persen), 2019	20
Gambar 2.4.	Perbandingan Target Kemiskinan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011-2018 dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011-2019	21
Gambar 2.5.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten OKU Selatan Dengan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 – 2019	22
Gambar 2.6.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	23
Gambar 2.7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2005 -2019	25
Gambar 2.8.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	27
Gambar 2.9.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	28

Gambar 2.10.	Persentase Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010 – 2019.....	30
Gambar 2.11.	Perkembangan Angka Morbiditas Kabupaten OKU Selatan Tahun 2007-2019 (Persen)	32
Gambar 2.12.	Persentase Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2007-2019 (persen).....	34
Gambar 2.13.	Angka Buta Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006 – 2019 (Persen)	37
Gambar 2.14.	Angka Melek Huruf menurut jenis Kelamin di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011 – 2019	38
Gambar 2.15	Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (persen) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2013 – 2019	40
Gambar 2.16.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (persen) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006 – 2019	41
Gambar 2.17.	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN sebagai Sumber Utama Penerangan (persen) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 – 2019	43
Gambar 2.18.	Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Listrik (persen) Tahun 2006 – 2019	44
Gambar 2.19.	Perbandingan Pertumbuhan Sektor Pertanian dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 – 2019	45
Gambar 3.1.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	49

Gambar 3.2.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	50
Gambar 3.3.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Angka Harapan Hidup	51
Gambar 3.4.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Angka Kesakitan	51
Gambar 3.5.	Perbandingan APK SD, SMP, SMA	52
Gambar 3.6.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Angka Buta Huruf	53
Gambar 3.7.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Sanitasi Layak..	53
Gambar 3.8.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Sumber Penerangan Listrik	54
Gambar 3.9.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Indikator Intervensi Bidang Ekonomi	55
Gambar 4.1.	Tampilan Aplikasi Kemiskinan SIMPATIK Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah didunia. Tingginya angka kemiskinan di dunia mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dunia. Semua Kabupaten/Kota maupun Provinsi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Masing-masing memiliki strategi dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan sebagai masalah sosial, merupakan sumber utama kelemahan bagi setiap orang untuk melakukan partisipasi disegala bidang kehidupan. Masalah kemiskinan hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ekonomi disamping indikasi pengelolaan negara dan sumber daya yang belum optimal. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi dan program penanggulangan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan Negara.

Pengurangan jumlah penduduk miskin dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) yang harus dicapai secara signifikan pada tahun 2015. Upaya penanggulangan kemiskinan adalah sesuai amanat Undang-Undang Dasar dan terkait juga dengan kesepakatan MDGs yang telah diintegrasikan dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek maupun menengah. Program MDGs yang terdiri dari 8 Goals, 18 Target dan 67 Indikator ini menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan kelestarian lingkungan. Tahun 2015 telah berlalu, maka berakhirilah salah satu program pembangunan dunia yang di kenal dengan Milenium Development Goals (MDGs), 15 tahun telah berlalu sejak digulirkannya skema Pembangunan Abad Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang digagas oleh PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Sebagai penggantinya maka diluncurkan suatu sistim pembangunan baru yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan demikian SDGs menjadi acuan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ada 17 kesepakatan dalam SDGs yaitu salah satunya adalah Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan

utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di Mana Pun” (*End poverty in all its forms everywhere*). Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain:

- (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin;
- (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan dirumuskan secara konkret dalam wujud kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten OKU Selatan, mulai dari RPJPD Tahun 2005 – 2025, RPJMD Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals*, serta Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dalam rangka mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur secara lugas tentang susunan keanggotaan dan peran yang harus diemban oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Kabupaten OKU Selatan sendiri telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 30/KPTS/BBAPPEDA & PM/2011 dan telah dirubah melalui Keputusan Bupati Nomor 279/KPTS/BAPPEDA & PM/2012 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi melalui Keputusan Bupati Nomor: 98/KPTS/Bappeda Litbang/2017, tanggal 27 Januari 2017. Perubahan ini diharapkan dapat membawa motivasi dan semangat yang lebih tinggi serta peningkatan kinerja bagi anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam mengemban amanah mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan.

Karakteristik kemiskinan yang bersifat multi dimensional menuntut langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui

pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan yang sistematis, komprehensif, dan terpadu memerlukan koordinasi yang harmonis yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Disinilah peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sangat penting dan signifikan. Efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi tersebut sangat penting peranannya mengingat banyaknya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh beragam instansi pemerintah. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat mencapai hasil yang diharapkan, yaitu penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Dalam rangka memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan serta upaya-upaya Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta hasil yang dicapai melalui program dan kegiatan tersebut, maka disusunlah **“Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019”**.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPPKD) Kabupaten OKU Selatan adalah untuk menyampaikan hasil kinerja secara menyeluruh tim yang telah dibentuk baik dari kebijakan,

program dan kegiatan maupun hal-hal yang telah dicapai serta permasalahan dan OKU Selatan yang dihadapi.

Tujuan dari disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPPKD) adalah :

1. Mengetahui perkembangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan.
2. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan.
3. Melakukan Review pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan agenda kegiatan tahun 2019 dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan.
4. Mengajukan rekomendasi dan saran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten OKU Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.
2. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
3. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota.
6. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 18 Februari 2010 Nomor 401/742/PMD Perihal Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 19 Oktober 2010 Nomor 080/2906/Bappeda/2010 Perihal Penyesuaian Keputusan Bupati/Walikota tentang TKPK dan Rapat Koordinasi TKPK kabupaten/kota.
8. Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor 98/KPTS/BAPPEDA LITBANG/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Landasan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten OKU Selatan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN OKU SELATAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten OKU Selatan

2.2. Perkembangan Kondisi Kemiskinan

2.2.1. Tingkat Kemiskinan

2.2.2. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

2.3. Perkembangan Dimensi Kemiskinan

2.3.1. Bidang Ketenagakerjaan

2.3.2. Bidang Kesehatan

2.3.3. Bidang Pendidikan

2.3.4. Bidang Infrastruktur Dasar

2.3.5. Bidang Ekonomi

2.4. Diagnosis Kemiskinan dan Dimensinya

BAB III PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Prioritas Bidang Ketenagakerjaan

3.2. Prioritas Bidang Kesehatan

3.3. Prioritas Bidang Pendidikan

3.4. Prioritas Bidang Infrastruktur

3.5. Prioritas Bidang Ekonomi

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN OKU SELATAN

4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN OKU SELATAN

5.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- 5.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah
- 5.1.2. Koordinasi dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat
- 5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- 5.3. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan
 - 5.3.1.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga
 - 5.3.1.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
 - 5.3.1.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
 - 5.3.1.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat)
 - 5.3.1.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah
- 5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 5.5. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
- 5.6. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN REKOMENDASI

- 6.1. Kondisi Tingkat Kemiskinan
- 6.2. Diagnosis Permasalahan: Kemiskinan dan Dimensinya
- 6.3. Prioritas Bidang Intervensi
- 6.4. Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian: (Sesuai dengan Temuan Permasalahan)
- 6.5. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

BAB II

KONDISI KEMISKINAN

DI KABUPATEN OKU SELATAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten OKU Selatan

Geografis

Kabupaten OKU Selatan di bentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi baru diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 16 Januari 2004 dengan ditunjuk Pejabat Sementara Bupati OKU Selatan.

Secara geografis Kabupaten OKU Selatan terletak antara $103^{\circ}22^1$ - $104^{\circ}21^1$ bujur timur dan $04^{\circ}14^1$ – $04^{\circ}55^1$ lintang selatan, dengan luas wilayah 549.394 Ha. Wilayah Kabupaten OKU Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan dan Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu,
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung,
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim,
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

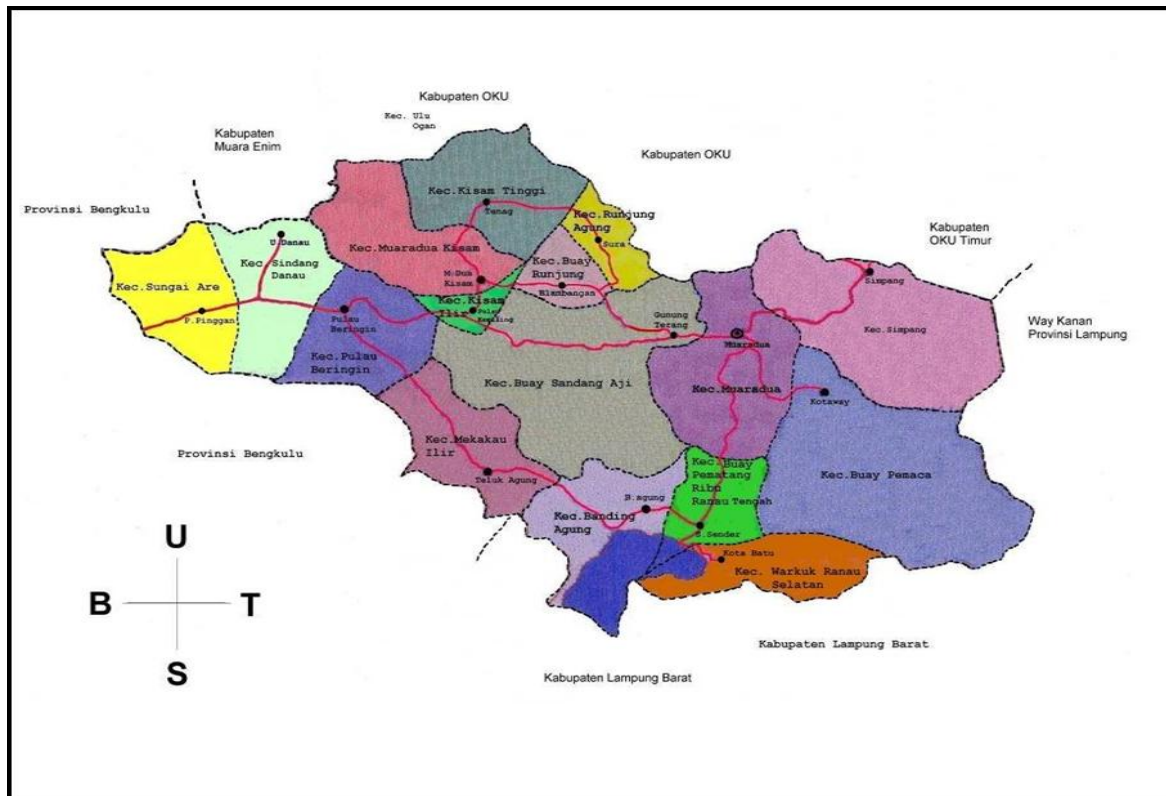
Kabupaten OKU Selatan terletak pada ketinggian 45 meter sampai 1.643 meter dari permukaan laut. Kabupaten OKU Selatan beriklim tropis basah, Kecamatan yang mempunyai temperatur udara rendah antara lain dapat dijumpai di daerah Kecamatan Banding Agung, Pulau Beringin, Muara Dua Kisam dan Kecamatan Kisam Tinggi. Kecamatan-kecamatan tersebut berada di daerah pegunungan.

Berdasarkan keadaan geografis, keadaan tanah di Kabupaten OKU Selatan sebagian besar berbukit dan bergunung-gunung. Dari luas total Kabupaten OKU Selatan, sebanyak 1,29 persen (7.082 Ha) dimanfaatkan untuk pemukiman, sawah irigasi non teknis 1,10 persen (6.068 Ha), pertanian tanah kering seluas 4.176 Ha (0,76 persen), kebun campuran sebanyak 12.525 Ha (2,28 persen), untuk perkebunan rakyat seluas 223.054 Ha (40,60 persen), alang-alang dan semak-semak seluas 1,04 persen (5.735 Ha), sementara hutan lebat dan hutan belukar seluas 278.659 Ha (50,72 persen), lahan perairan darat seluas 10.046 Ha (1,83 persen), dan sisanya seluas 2.049 Ha peruntuknya adalah sebagai jalan dan sungai. Di Kabupaten OKU Selatan terdapat banyak lokasi wisata seperti danau, sumber air panas dan gunung. Danau yang potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata di Kabupaten OKU Selatan diantaranya danau Ranau yang terletak di Kecamatan Banding Agung danau Rakihan di Kecamatan Sindang Danau dan danau Halim di Kecamatan Buay Rawan. Untuk wisata gunung, di Kabupaten OKU Selatan terdapat Gunung Seminung yang tepatnya terletak di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, dengan ketinggian sekitar 1.888 meter dari permukaan laut.

Selain itu juga, di Kabupaten OKU Selatan terdapat beberapa sumber air panas, seperti sumber air panas di kaki Gunung Seminung Kecamatan Banding

Agung, sumber air panas daerah Bayur Kecamatan Muaradua Kisam dan sumber air panas daerah Ulu Danau di Kecamatan Sindang Danau.

Gambar 2.1. Peta wilayah Kabupaten OKU Selatan



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan

Wilayah Administratif Dan Pemerintahan

Kabupaten OKU Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003. Dalam perkembangannya, guna memenuhi tuntutan pembangunan Kabupaten OKU Selatan sampai saat ini telah memiliki 19 kecamatan dan 252 desa dan 7 kelurahan. Dengan pemekaran ini diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat selain mempercepat pembangunan dan pembukaan akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolir. Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten OKU Selatan telah melaksanakan tiga kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni Pilkada 2005, Pilkada 2010 dan

Pilkada 2014. Sejak berdirinya, Kabupaten OKU Selatan telah 3 (tiga) kali pergantian Bupati dan Wakil Bupati yaitu H. Muhtadin Sera'i yang menjabat selama 2 (dua) periode (2005 - 2009 dan 2010 - 2014). Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati OKU Selatan periode 2016 sampai dengan 2021 yang sekarang dijabat oleh Popo Ali M, B.Commerce dan Solihien Abuasier, SP., M.Si.

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mekakau Ilir	26.115	15
2	Banding Agung	27.638	22
3	Warkuk Ranau Selatan	23.948	16
4	BPR Ranau Tengah	35.320	22
5	Buay Pemaca	71.452	22
6	Simpang	34.229	7
7	Buana Pemaca	19.010	8
8	Muaradua	26.195	14
9	Buay Rawan	16.700	11
10	Buay Sandang Aji	45.000	16
11	Tiga Dihaji	15.345	8
12	Buay Runjung	17.119	14
13	Runjung Agung	15.741	9
14	Kisam Tinggi	41.700	19
15	Muaradua Kisam	21.980	18
16	Kisam Ilir	13.602	9
17	Pulau Beringin	47.651	13
18	Sindang Danau	21.000	7
19	Sungai Are	29.649	9
Jumlah		549.394	259

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019, jumlah anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan periode 2020 - 2024 adalah 40 orang, dengan komposisi 35 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Seluruh anggota DPRD tersebut tergabung dalam 6 (enam) fraksi. Pada tahun 2019, terdapat 5.181 orang ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan, yang tersebar di unit-unit organisasi di bawah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten OKU Selatan.

Penduduk

Penduduk adalah seseorang yang menetap di suatu wilayah selama minimal 6 bulan atau berniat menetap di wilayah tersebut minimal 6 bulan ke depan. Penduduk memegang peranan penting karena menjadi sumber daya manusia bagi terlaksananya pembangunan. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pembangunan. Kabupaten OKU Selatan tahun 2019 memiliki penduduk sebanyak 361,085 jiwa. Melihat keadaan luas wilayah pada tiap-tiap kecamatan dan dihubungkan dengan jumlah penduduknya, maka akan terlihat ketimpangan kepadatan (*density disparity*) penduduk di Kabupaten OKU Selatan. Kepadatan penduduk setiap kecamatan tidak merata, berkisar antara 33 sampai 182 orang/km², kecuali Kecamatan Muaradua yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 182 orang/km².

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas/Area		Penduduk		Kepadatan Penduduk Orang/ Km2
		Km2	%	Jumlah	%	
1		2	3	4	5	6
1.	Mekakau Ilir	261,15	4,75	20,069	5.56	76.85
2.	Banding Agung	276,38	5,03	21,253	5.89	76.90

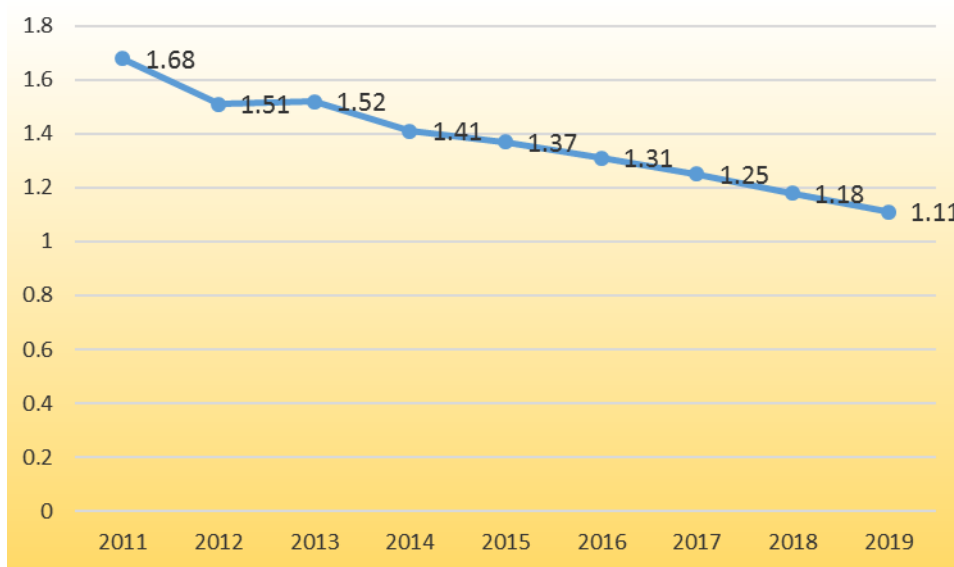
No	Kecamatan	Luas/Area		Penduduk		Kepadatan Penduduk Orang/ Km2
		Km2	%	Jumlah	%	
1		2	3	4	5	6
3.	Warkuk Ranau Selatan	239,48	6,43	23,136	6.41	96.61
4.	BPR Ranau Tengah	353,20	4,36	22,055	6.11	62.44
5.	Buay Pemaca	714,52	13,01	43,719	12.11	61.19
6.	Simpang	342,29	6,23	14,607	4.05	42.67
7.	Buana Pemaca	190,10	3,46	13,274	3.68	69.83
8.	Muaradua	261,95	4,77	47,852	13.25	182.68
9.	Buay Rawan	167,00	3,04	13,492	3.74	80.79
10	Buay Sandang Aji	450,00	8,19	18,273	5.06	40.61
11	Tiga Dihaji	153,45	2,79	9,819	2.72	63.99
12	Buay Runjung	171,19	3,12	10,673	2.96	62.35
13	Runjung Agung	157,41	2,87	12,153	3.37	77.21
14	Kisam Tinggi	417,00	7,59	19,501	5.40	46.76
15	Muaradua Kisam	219,80	4	18,565	5.14	84.46
16	Kisam Ilir	136,02	2,48	7,598	2.10	55.86
17	Pulau Beringin	476,51	8,67	25,612	7.09	53.75
18	Sindang Danau	210,00	3,82	9,362	2.59	44.58
19	Sungai Are	296,49	5,4	10,072	2.79	33.97
	Kabupaten OKUS	5.493,94	100	361,085	100.00	65.72

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Jumlah penduduk Kabupaten OKU Selatan selalu mengalami peningkatan sejalan dengan kemajuan pembangunan yang juga semakin pesat. Pada tahun 2019 telah terjadi kenaikan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten OKU Selatan dari 1,18 persen (Tahun 2018) menjadi 1,11 persen (Tahun 2019).

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten OKU Selatan

Tahun 2011 - 2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi makro suatu wilayah masih merupakan ukuran yang valid untuk digunakan dalam melihat potensi sekaligus perkembangan kapasitas perekonomian suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. PDRB Kabupaten OKU Selatan selama kurun waktu 2010 - 2019 menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, PDRB Kabupaten OKU Selatan berdasarkan atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 adalah sebesar 3.663,7 milyar rupiah.

Tabel 2.3. Perkembangan PDRB di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010 – 2019

Tahun	Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Harga Konstan (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)
2010	3.663.702,1	3.663.702,1
2011	4.133.577,0	3.854.386,1
2012	4.672.224,1	4.056.975,3
2013	5.223.946,7	4.268.754,1
2014	5.831.859,2	4.498.084,8
2015	6.371.602,1	4.707.443,0
2016	4.951.559,0	7.014.614,6
2017	7.592.138,1	5.175.051,6
2018	8.163.450,8	5.441.961,1
2019	8.816.739,5	5.717.906,5

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

PDRB Kabupaten OKU Selatan terus meningkat hingga mencapai 8.816,73 milyar rupiah pada tahun 2019. Sementara itu berdasarkan harga konstan Tahun 2010 PDRB Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2010 sebesar 3.663,70 milyar rupiah dan juga terus mengami peningkatan menjadi sebesar 5.717,90 milyar rupiah pada tahun 2019. Ada tiga sektor yang menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten OKU Selatan tahun 2019. PDRB atas dasar harga berlaku untuk sektor pertanian pada tahun 2019 di Kabupaten OKU Selatan mencapai 31,00 persen, kemudian sektor lain yang ikut menyumbang angka PDRB adalah sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (persen), 2015-2019

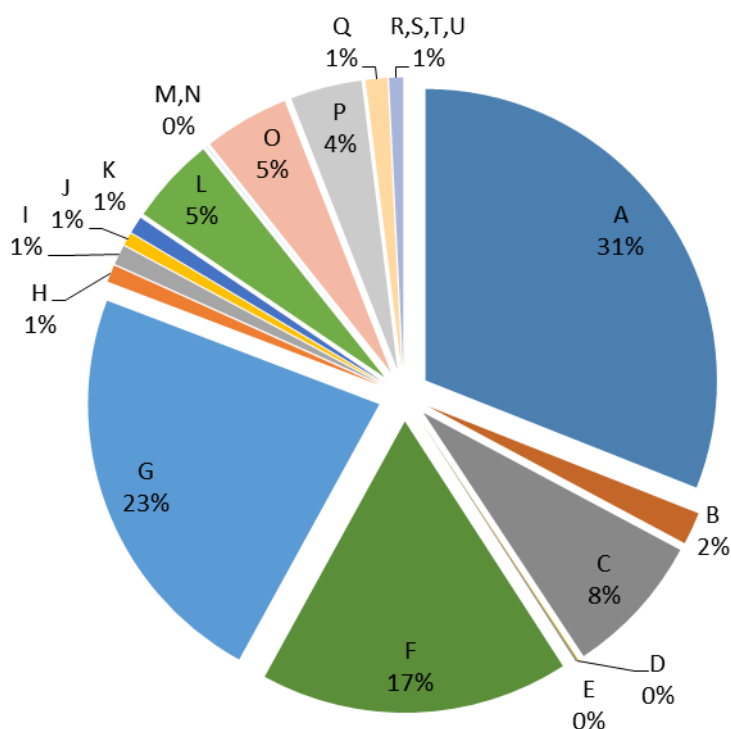
No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,81	33,56	32,63	31,76	31,00
B	Pertambangan dan Penggalian	1,93	1,81	1,76	1,8	1,8
C	Industri Pengolahan	7,06	7,03	7,51	1,8	1,8
D	Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih	0,06	0,08	0,09	0,09	0,09
E	Konstruksi	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
F	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,69	16,46	16,96	17,38	17,13
G	Transportasi dan Pergudangan	19,51	21,03	21,43	21,85	22,79
H	Transportasi dan Pergudangan	0,82	0,82	0,9	0,94	0,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,93	0,96	1,01	1,10
J	Informasi dan Komunikasi	0,49	0,56	0,62	0,67	0,70
K	Jasa keuangan dan Asuransi	0,99	0,99	0,98	0,98	0,94
L	Real Estat	4,46	4,46	4,43	4,69	4,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,96	5,97	5,38	5,02	4,73
P	Jasa Pendidikan	4,43	4,4	4,33	4,16	3,96
Q	Jasa Kesehatan	1,2	1,16	1,21	1,17	1,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,72	0,7	0,73	0,75	0,78
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

*)Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku); ADHK (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019)

Gambar 2.3

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (persen), 2019



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

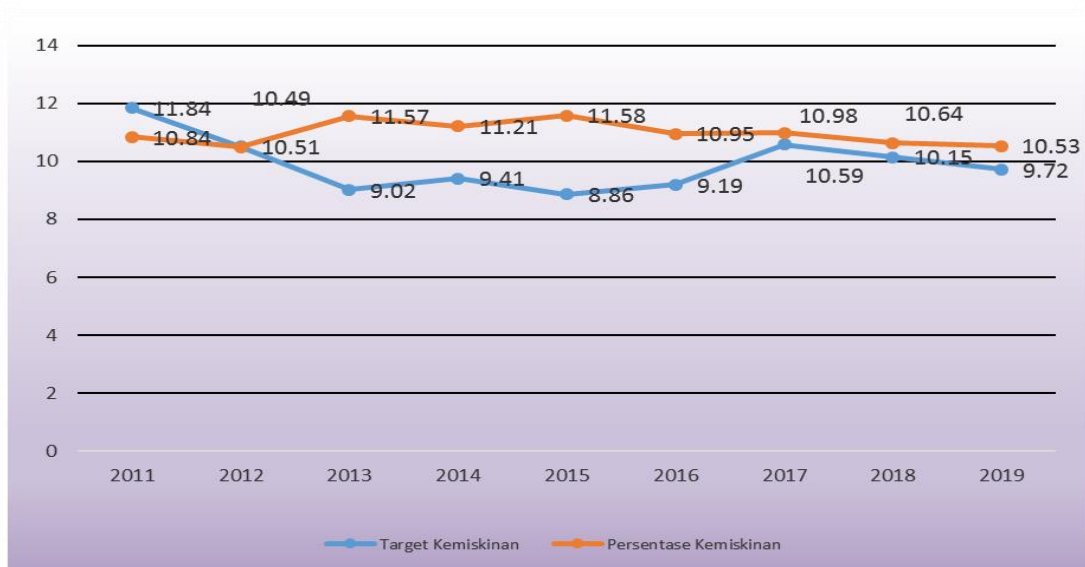
2.2. Perkembangan Kondisi Kemiskinan

2.2.1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Terkait masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah menetapkan pencapaian target angka kemiskinan selama lima tahun ke depan (2016-2021) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten OKU Selatan 2016-2021. Namun pada kenyataannya tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan belum bisa sebagaimana yang ditargetkan dan masih memerlukan perhatian yang serius.

Gambar 2.4. Perbandingan Target Kemiskinan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011-2018 dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011-2019



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan dan BPS Kabupaten OKU Selatan

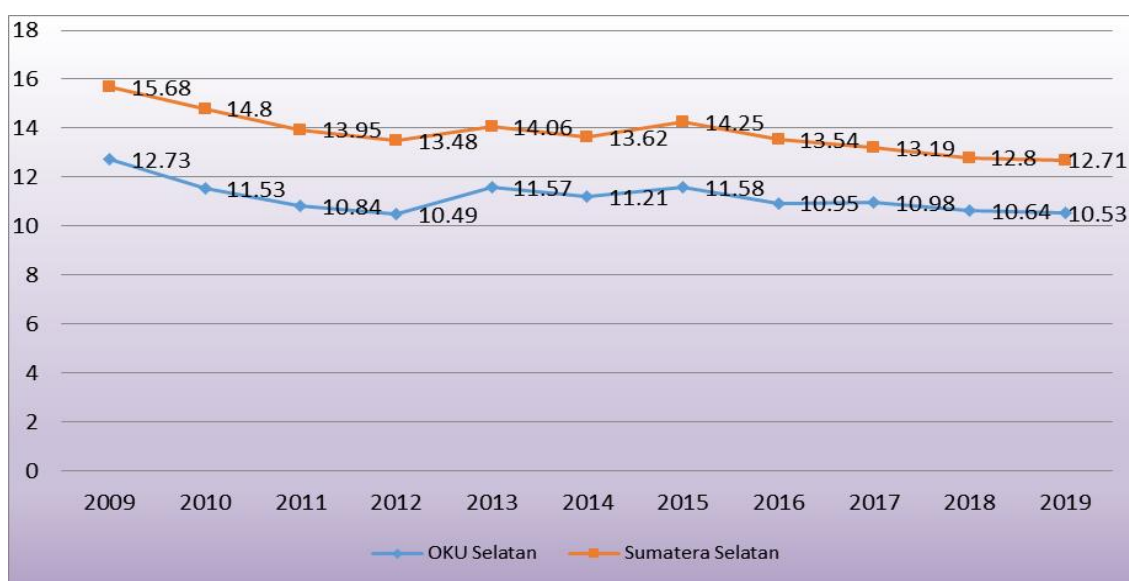
Pencapaian tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan tidak selalu sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan pemerintah belum terlalu berhasil dalam mencapai target tingkat kemiskinan sesuai dengan RPJMD. Walaupun pada tahun 2012 capaian tingkat kemiskinan pernah dibawah target, namun pada tahun tahun berikutnya semakin terjadi gap antara target kemiskinan yang ditetapkan dengan kondisi yang terjadi. Gap tersebut pada tahun 2019 semakin lebar jika dibandingkan dengan tahun 2018. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dalam menurunkan tingkat

kemiskinan ini.

Apabila dilihat dalam tren tingkat kemiskinan dari tahun 2009 sampai 2019 terlihat bahwa pemerintah sesungguhnya telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari pada gambar dibawah ini. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan walaupun belum dapat mencapai target yang ditentukan dalam RPJMD. Tahun 2009 tingkat kemiskinan di kabupaten ini sebesar 12,73 persen namun pada tahun 2019 ini hanya sebesar 10,53 persen.

Gambar 2.5. Perbandingan Tingkat Kemiskinan

Kabupaten OKU Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 - 2019

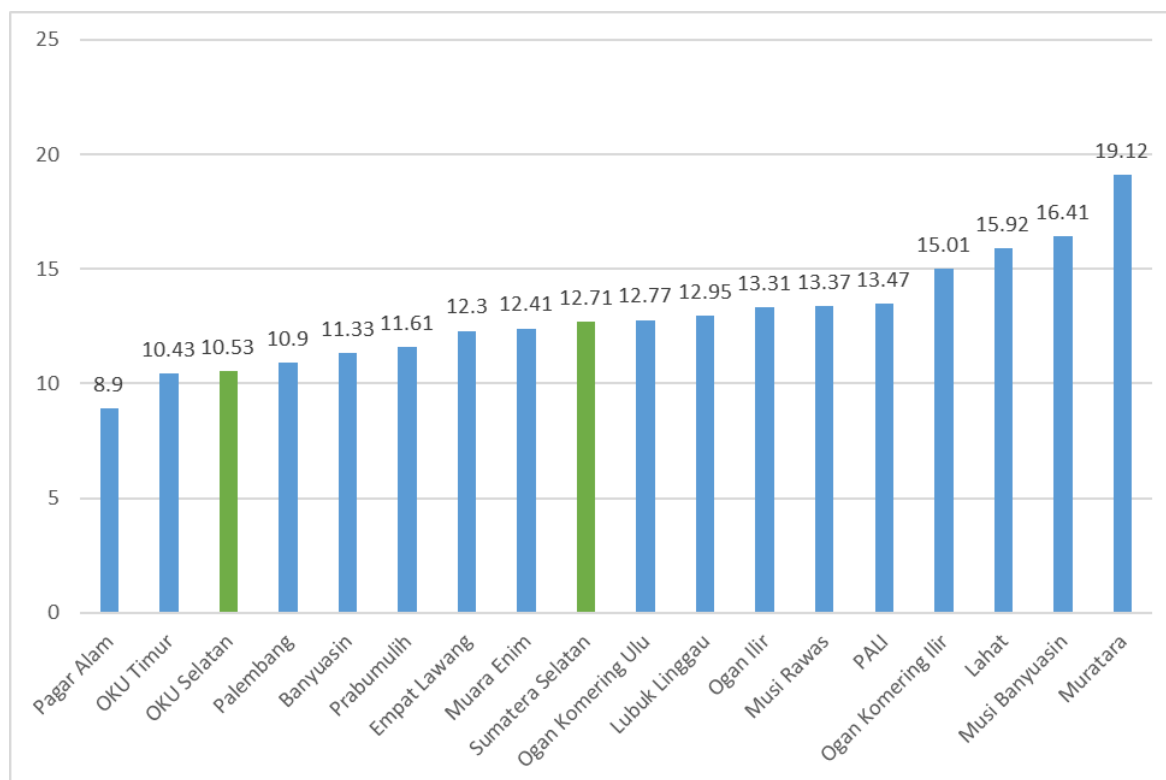


Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Sementara itu, pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan di kabupaten OKU Selatan cukup kecil dan termasuk dalam tiga besar kategori kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terkecil setelah Kota Pagar Alam yang sebesar 8,9 persen dan Kabupaten OKU Timur sebesar 10,43 persen. Tingkat kemiskinan di Kabupaten

OKU Selatan pada tahun 2019 ini juga berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 10,53 persen. Namun demikian masih diatas tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 11,22 persen.

Gambar 2.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.5. Tingkat Kemiskinan Menurut Bank Dunia

Tahun	40 % Penduduk Berpendapatan Rendah	40 % Penduduk Berpendapatan Sedang	20 % Penduduk Berpendapatan Tinggi
2011	22,85	37,52	39,63
2012	22,22	35,46	42,32
2013	23,11	35,59	41,3
2014	21,63	35,34	43,03
2015	21,5	38,76	39,73
2016	20,94	38,54	40,52
2017	17,07	35,48	47,44
2018	20,55	39,23	40,21
2019	20,39	38,65	40,96

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Jika dilihat dari komposisi pendapatan penduduk menurut Bank Dunia pendapatan penduduk 40 persen terbawah sebesar 20,39 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 20,55 persen. Sedangkan pendapatan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi mengalami kenaikan dari 40,21 persen menjadi 40,96 persen pada tahun 2019. Peningkatan ini berdampak pada peningkatan porsi pendapatan pada 40 persen penduduk berpendapatan sedang yang menjadi 38,65 persen pada tahun 2019 yang sebelumnya 39,23 persen pada tahun 2018.

2.2.2. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

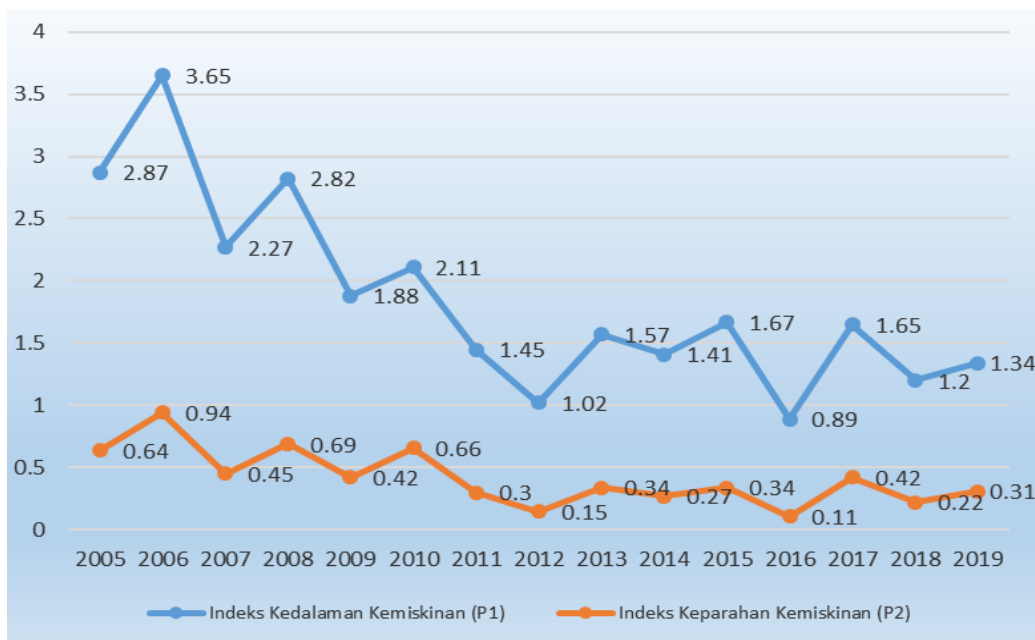
Kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan juga dapat dilihat dari penurunan dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan. Ukuran ini juga merupakan ukuran yang penting dalam melihat kondisi kemiskinan di suatu daerah. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan nilai rata-rata kesenjangan (*gap*) pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar Indeks kedalaman kemiskinan atau rata-rata kesenjangan ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin masih jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan.

Adapun indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran penyebaran di antara penduduk miskin atau dapat menggambarkan intensitas kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ini juga menunjukkan kuadrat

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini memberikan bobot lebih tinggi bagi mereka yang jauh berada di bawah garis kemiskinan. Perbaikan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan bagi mereka yang benar-benar miskin.

Selama periode 2005 - 2019, baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Pada tahun 2005, nilai indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,87 persen dan nilai tersebut mengalami fluktuasi ke tahun 2019 yang menunjukkan angka 1,34. Angka terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,89 dan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2017, serta kembali lagi turun pada tahun 2018 menjadi 1,2. Kenaikan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran dan konsumsi penduduk miskin cenderung makin menurun dan menjauhi nilai garis kemiskinan.

Gambar 2.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2005 - 2019

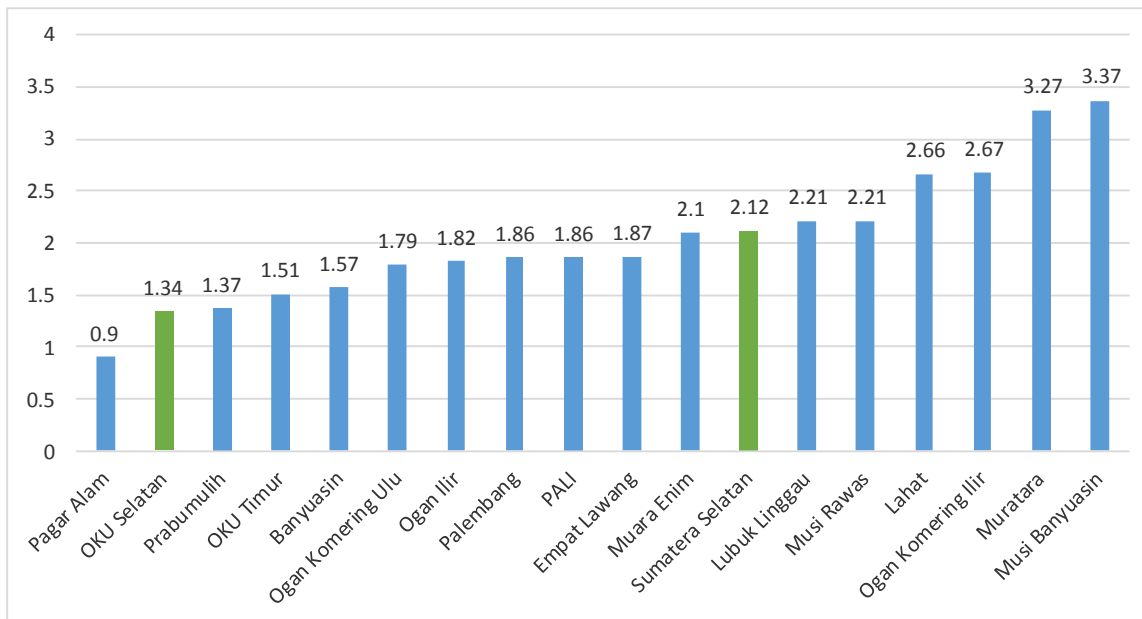


Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami fluktuasi dari tahun 2015 ke tahun 2019. Akan tetapi terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan, yaitu sebesar 0,64 persen pada tahun 2005 menjadi 0,31 persen pada tahun 2019. Angka terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,11 dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,42 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019. Kenaikan nilai ini menunjukkan bahwa variasi dan ketimpangan (*gap*) pengeluaran rumah tangga penduduk miskin cenderung naik. Kecenderungan penurunan nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di OKU Selatan semakin turun dikarenakan program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan sudah cukup optimal.

Sejalan dengan angka kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami posisi yang lebih baik daripada Kota Prabumulih. Kabupaten OKU Selatan menempati urutan ke-2 terkecil setelah Kota Pagar Alam dengan indeks kedalaman kemiskinannya sebesar 1,34 poin walaupun persentase penduduk miskin Kabupaten OKU Selatan masih diatas Kabupaten OKU Timur yang menempati urutan keempat setelah Kota Prabumulih yakni sebesar 1,51. Rendahnya tingkat kedalaman kemiskinan yang di bawah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa program pengentasan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah cukup optimal dilaksanakan.

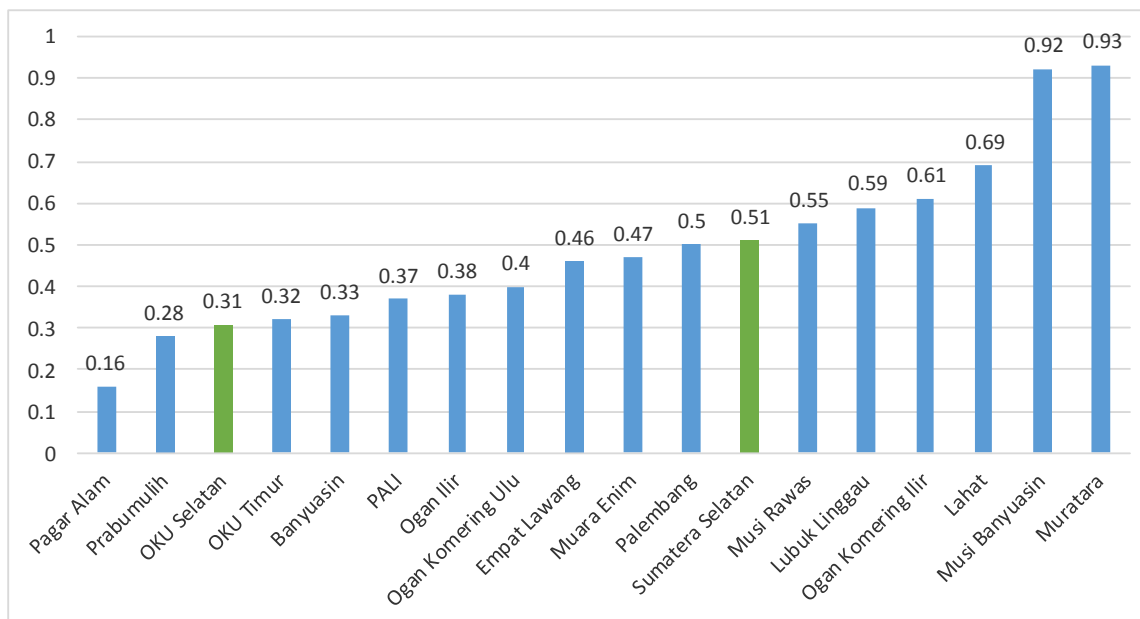
Gambar 2.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tingkat kemiskinan yang rendah dibandingkan dengan daerah lain juga terlihat dari nilai indeks keparahan kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Posisi nilai indeks keparahan kemiskinan OKU Selatan juga termasuk yang paling rendah sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan yakni sebesar 0,31 setelah Kota Prabumulih sebesar 0,28 walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,22 dan digeser Kota Prabumulih pada urutan kedua. Perbedaan Kota Prabumulih dan Kabupaten OKU Selatan terpaut 0,03 dan terpaut 0.01 jika dibandingkan dengan Kabupaten OKU Timur di urutan keempat. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan sudah cukup optimal walaupun terjadi kenaikan.

Gambar 2.9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

2.3. Perkembangan Dimensi Kemiskinan

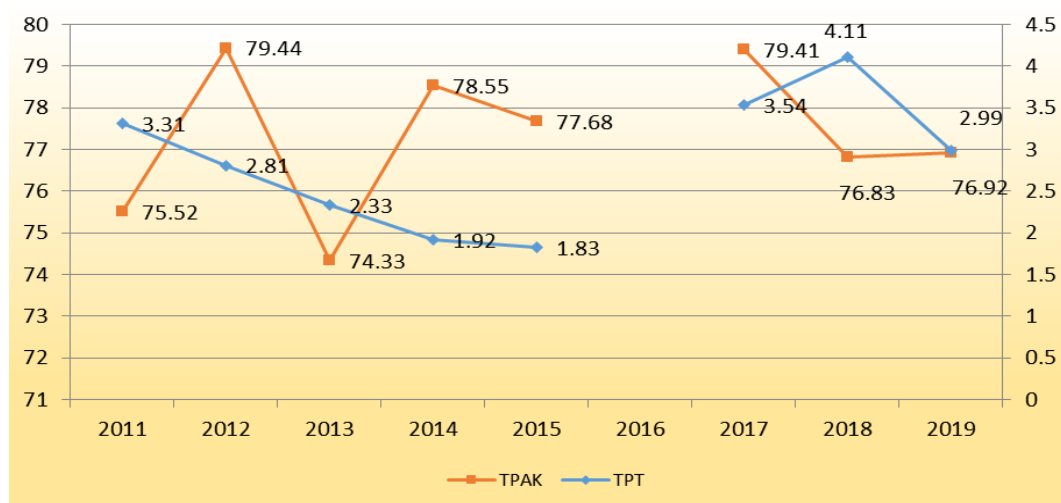
2.3.1. Bidang Ketenagakerjaan

Merupakan suatu hal yang umum, bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang memadai pada permintaan tenaga kerja karena terbatasnya lapangan kerja yang ada. Sebagai akibatnya, sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran. Pengangguran merupakan persoalan yang dilematis, di mana pemerintah atau instansi yang mengurus ketenagakerjaan sebenarnya mampu mengurangi atau menekan angka pengangguran tapi ketika terjadi proses penekanan angka pengangguran maka akan terjadi implikasi lainnya di sektor ekonomi. Implikasi ini dapat terjadi akibat dari perubahan-perubahan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan teori ekonomi menyatakan bahwa jika perekonomian berada dibawah *full employment*, maka pendapatan dapat ditingkatkan melalui

peningkatan pada pengeluaran pemerintah, atau dengan menurunkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usaha untuk menekan pengangguran mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak yang diterima oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan di setiap negara maju mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur. Dan bagi negara yang masih berkembang, pengangguran merupakan persoalan yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Dan akhirnya pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,99. Tahun 2011 sebesar 3,31 persen dan turun menjadi 2,81 persen pada tahun 2012. Dan terus mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 1,92 persen pada tahun 2014 . dan puncaknya terendah pada tahun 2015 sebesar 1,83 persen yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 yakni sebesar 3,54 persen dan 4,11 persen. TPT perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki karena lapangan usaha yang tersedia di Kabupaten OKU Selatan lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.

Gambar 2.10. Persentase Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010 – 2019



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Jika dilihat dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perkembangan dari tahun 2011 ke tahun 2018 menunjukan kenaikan. Sampai dengan tahun 2015 tingkat pengangguran mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mulai mengalami kenaikan yakni 3,54 dan 4,11. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. TPAK mengalami kenaikan pada tahun 2019 seiring dengan terjadi penurunan pada TPT sedangkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sehingga menyebabkan kenaikan TPT.

2.3.2. Bidang Kesehatan

Salah satu aspek terpenting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka harapan hidup. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan

status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) selama lima tahun terakhir tahun 2010 - 2019, estimasi angka harapan hidup penduduk Kabupaten OKU Selatan terus meningkat walaupun kecil. Pada tahun 2010, angka harapan hidup penduduk mencapai 65,68 tahun dan meningkat menjadi 65,72 tahun pada tahun 2011. Dan pada tahun 2018 angka harapan hidup penduduk Kabupaten OKU Selatan menjadi 66,49.

Tabel. 2.6. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019.

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
2010	65,68
2011	65,72
2012	65,75
2013	65,77
2014	65,78
2015	66,08
2016	66,16
2017	66,24

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
2018	66,49
2019	66,76

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka morbiditas, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan sebelum pencacahan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

Gambar 2.11. Perkembangan Angka Morbiditas/Kesakitan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2007 - 2019 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

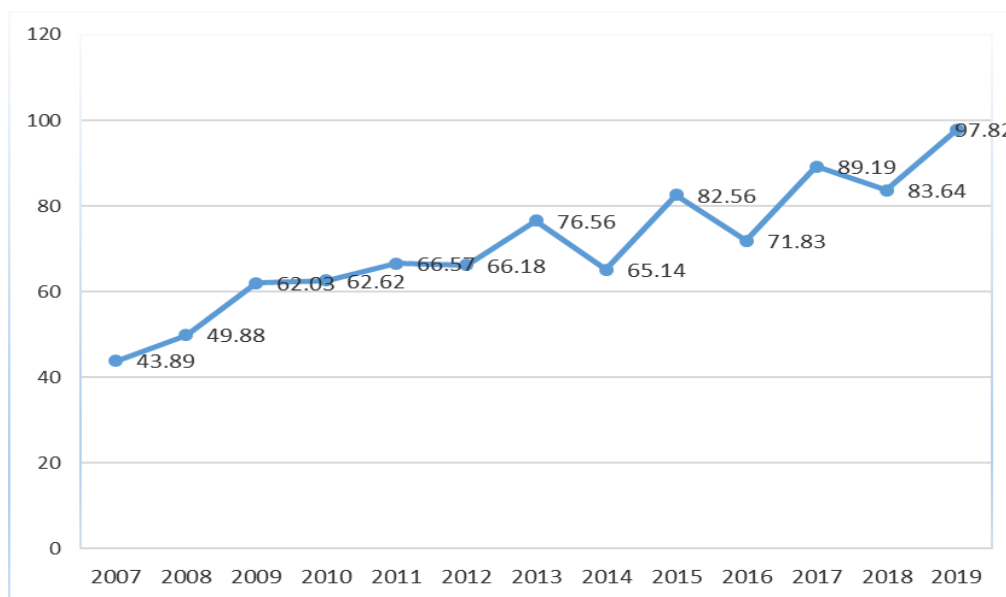
Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya turun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019. Walaupun terjadi peningkatan di beberapa tahun.

Akan tetapi tahun 2016 merupakan angka terendah yakni sebesar 8,15. Angka tertinggi terjadi tahun 2010 sebesar 28,96 setelah itu terjadi penurunan dan kembali naik pada tahun 2014 dan turun kembali sampai dengan tahun 2019 yakni menjadi sebesar 10,27. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat yang terlihat dari adanya keluhan indikasi terkena penyakit tertentu atau gangguan kesehatan fisik dan jiwa di Kabupaten OKU Selatan sudah baik. Kabupaten OKU Selatan cenderung berada di bawahnya dengan tren menurun setiap tahunnya.

Angka Persentase Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Pada tahun 2019 persentase kelahiran ditolong tenaga kesehatan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini 97,82 persen kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 2,18 persen kelahiran di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2019 yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah sudah melakukan perbaikan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Gambar 2.12. Persentase Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2007-2019 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Namun, apabila dilihat lebih detail ada kemajuan yang menggembirakan mengenai angka kelahiran yang ditolong oleh dokter. Dari data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa persentase penolong kelahiran oleh dokter mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah ibu yang melahirkan pada tahun 2019, sebesar 19,00 persen ditolong oleh dokter. Berbanding terbalik dengan itu, kelahiran yang ditolong oleh bidan mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2019. Pada tahun ini sekitar 59,47 persen kelahiran yang ditolong oleh bidan dan 2,18 persen kelahiran ditolong oleh dukun. Proses melahirkan ditolong oleh dukun menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada tenaga medis kesehatan. Sementara itu proses melahirkan ditolong oleh dukun juga masih cukup tinggi setelah kelahiran yang ditolong oleh bidan. Hal ini tidak masalah,

akan tetapi harus dukun yang terlatih dan dilatih oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Hal ini perlu mendapat perhatian dari dinas terkait, banyak faktor ibu melahirkan lebih memilih kepada dukun, diantaranya tidak adanya tenaga kesehatan di daerah tersebut. Pemerintah dituntut untuk mengatasi masalah ini dengan serius.

Tabel. 2.7. Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2010-2019

Penolong Kelahiran	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
Dokter	7,8	1,96	1,94	4,7	3,05	0	12,59	17,07	19,00
Bidan	58,36	63,88	74,62	60,5	79,51	71,81	73,05	66,57	59,47
Dukun	32,24	32,19	22,43	33,7	17,44	28,17	9,18	15,18	2,18
Famili/ keluarga	1,19	1,63	1,01	1,1	0	0	1,63	1,17	0

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

2.3.3. Bidang Pendidikan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencanangkan program Pendidikan Gratis untuk seluruh masyarakat Sumsel, tidak terkecuali di Kabupaten OKU Selatan. Hal ini disadari bahwa pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Karena belum semua anak di Kabupaten OKU Selatan dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain faktor kemiskinan keluarga. Titik berat pendidikan formal adalah

peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain program pendidikan gratis, berbagai upaya juga dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan perbaikan kurikulum, itu semua dalam rangka mencapai terlaksananya program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka Partisipasi Kasar

Sampai dengan tahun 2019, peran serta masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan dasar masih belum menggembirakan. Tentu banyak faktor yang menyebabkan partisipasi penduduk usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan dasarnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan proporsi jumlah siswa pada jenjang sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk pada usia yang bersesuaian dengan jenjang sekolah tersebut. Di Kabupaten OKU Selatan, untuk jenjang sekolah dasar/ sederajat, APK telah mencapai lebih dari 100 persen yakni 112,19 persen. Artinya jumlah siswa SD/ Sederajat melebihi jumlah penduduk berusia 7-12 tahun.

Tabel. 2.8. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

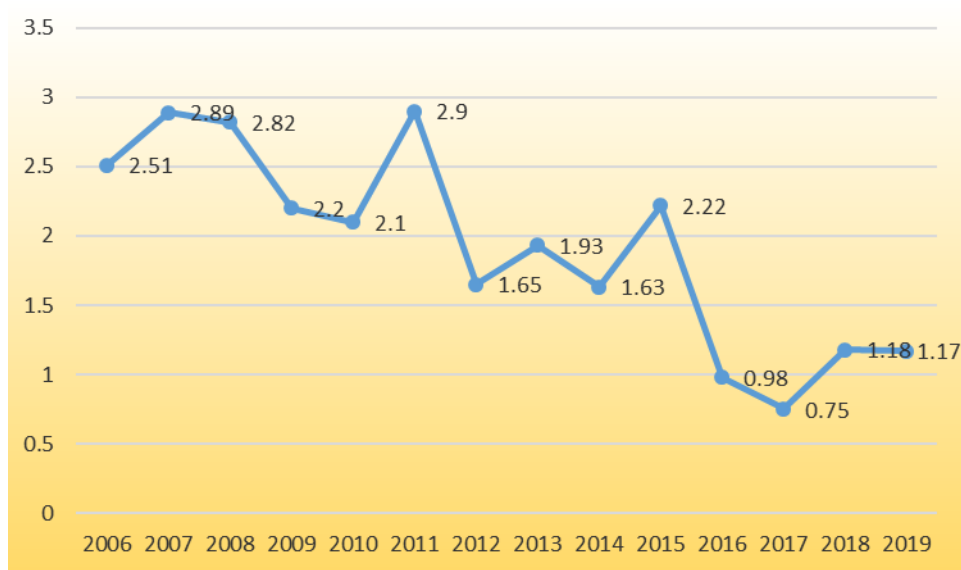
Jenjang Sekolah	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD/MI	99,21	112,19
SMP/MTs	78,67	86,65
SMA/MA	60,96	75,21

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Akan tetapi di atas jenjang SD, APK semakin kecil. Untuk jenjang SMP, APK Kabupaten OKU Selatan hanya sekitar 86,65 persen dan SMA sebesar 75,21 persen. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah semakin rendah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya pada tingkat SMP dan SMA. Sesuai dengan target SDGs, untuk melihat partisipasi anak usia sekolah pada jenjang sekolah yang bersesuaian maka digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM dapat menggambarkan tingkat partisipasi anak bersekolah secara lebih tajam. Sampai dengan tahun 2019, APM SD di Kabupaten OKU Selatan belum mencapai angka 100 persen. Sejalan dengan APK, APM SMP dan SMA pun semakin mengecil. APM SMA sebesar 60,96 persen mengindikasikan bahwa anak usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA di Kabupaten OKU Selatan hanya separuhnya saja.

Angka Buta Huruf

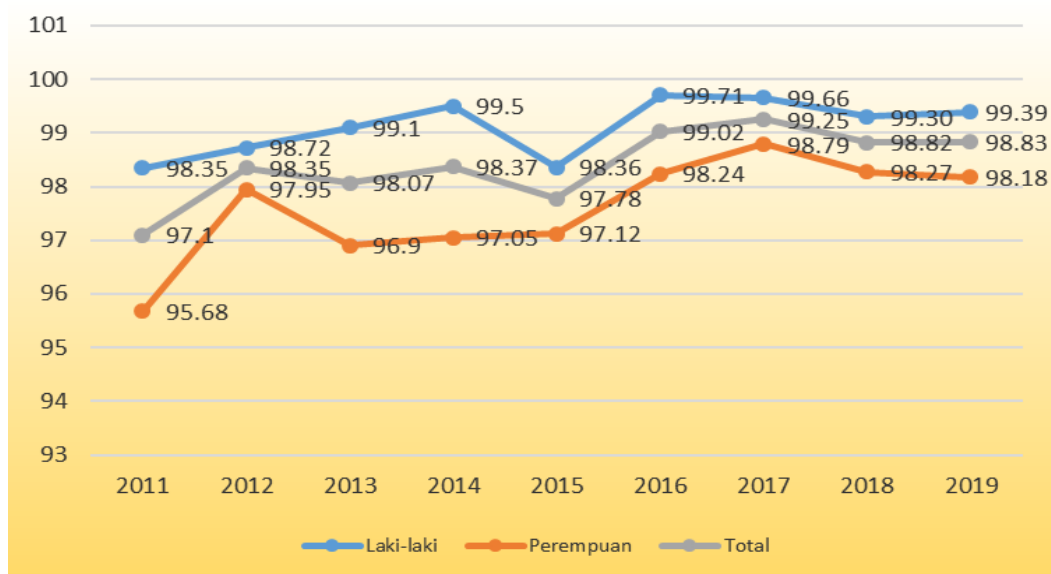
Gambar 2.13. Angka Buta Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2019 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka buta huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Persentase penduduk yang buta huruf di Kabupaten OKU Selatan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali dibanding tahun sebelumnya. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang masih buta huruf pada tahun 2019 sebesar 1,17 persen. Artinya penduduk di Kabupaten OKU Selatan yang telah melek huruf sudah mencapai 98,83 persen. Walau bagaimanapun, buta huruf ini akan sulit untuk diberantas sampai nol persen selama kemiskinan masih ada, akan tetapi bisa ditekan seminimal mungkin.

Gambar 2.14. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin, 2011-2019



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten OKU Selatan, diperlukan berbagai upaya yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, yaitu:

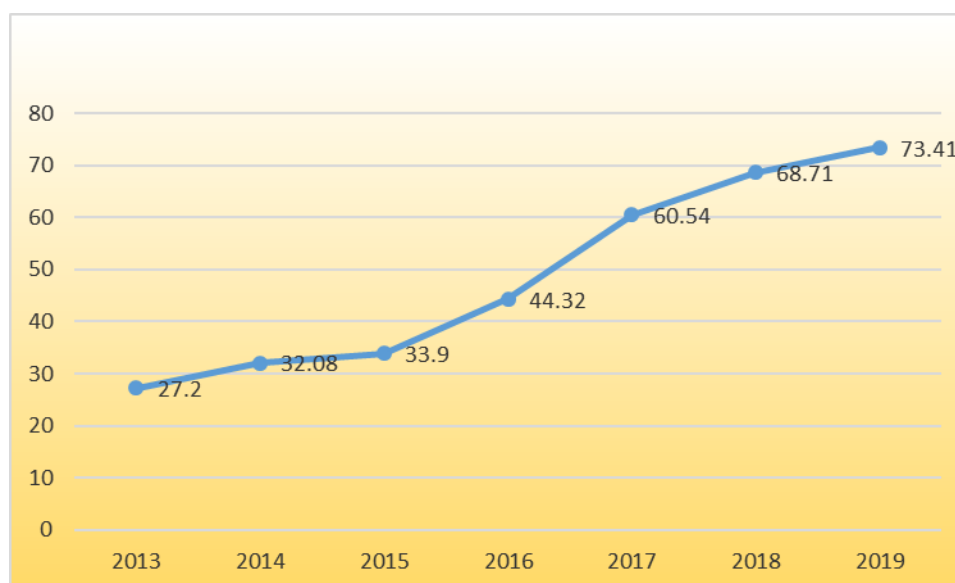
- Peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar dan menengah, dengan target utama daerah dan masyarakat terpencil dan miskin. Dalam rangka mendukung upaya ini, maka pemerintah Kabupaten OKU Selatan perlu meningkatkan kualitas pelayanan Sekolah Gratis.
- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat mereka gunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Peningkatan efisiensi manajemen pendayagunaan sumber daya pendidikan, serta mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efisien dan efektif.

2.3.4. Bidang Infrastruktur Dasar

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Secara konsep dan definisi, yang dimaksud fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga di daerah urban maupun rural, meskipun risikonya lebih besar di daerah urban karena lebih sulit menghindari kontak dengan pembuangan kotoran. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Gambar 2.15. Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (persen)
di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2013-2019

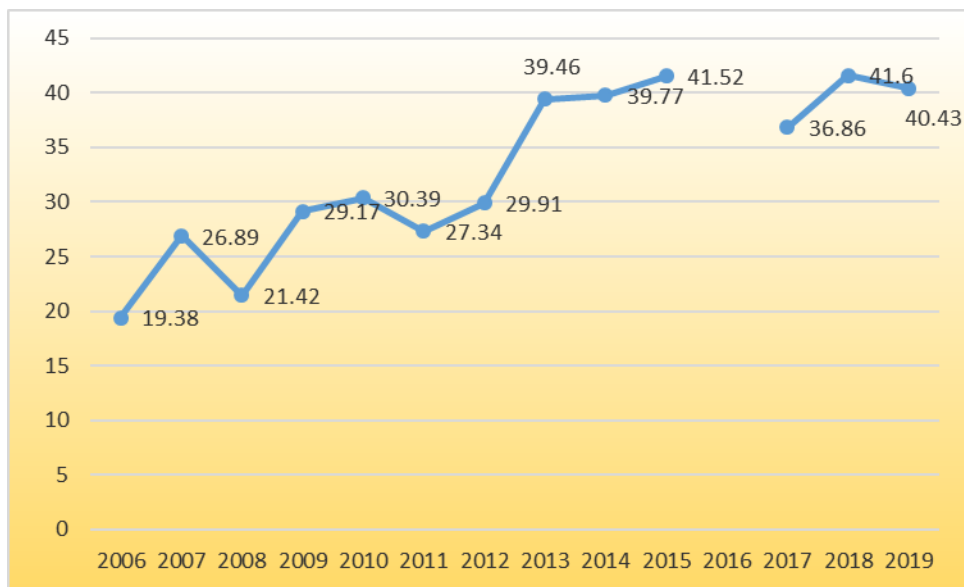


Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Walau pun demikian, ternyata sampai dengan tahun 2013 rumah tangga dengan sanitasi layak baru sebesar 27,2 persen. Sementara itu pada tahun 2019 kondisi ini terus mengalami peningkatan hingga lebih dari separuh rumah tangga yang ada di OKU Selatan dengan kondisi sanitasi layaknya menjadi sebesar 73,41 persen. Angka ini meningkat cukup tajam bila dibanding dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak rumah tangga di Kabupaten OKU Selatan yang memiliki sanitasi layak. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan sudah melakukan langkah yang efektif dalam menyediakan fasilitas dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang layak.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Gambar 2.16. Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih (persen)
di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Secara konsep dan definisi, yang dimaksud air minum terlindung adalah air leding, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa/sumur/mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum. Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

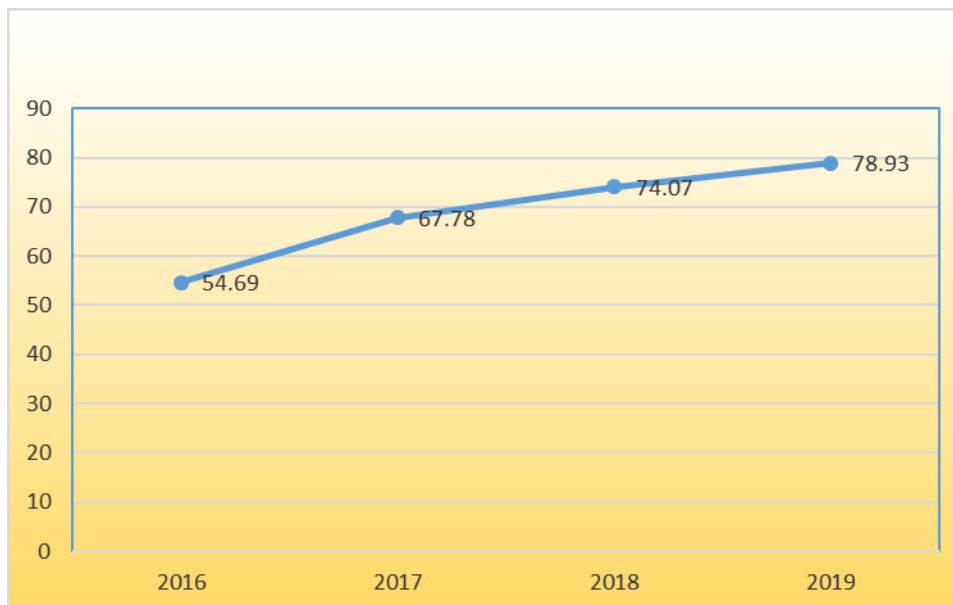
Proporsi rumah tangga yang menggunakan air minum bersih di kabupaten OKU Selatan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 turun sebesar 40,43 persen rumah tangga di Kabupaten OKU selatan yang menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hal ini menggambarkan penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari sudah terus membaik dan keadaan ini menggambarkan bahwa pembangunan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat OKU Selatan sudah optimal, untuk masyarakat pedesaan ini dipengaruhi oleh program PAMSIMAS yang berjalan dengan baik. Walaupun demikian penggunaan air minum layak bagi setiap rumah tangga di Kabupaten OKU Selatan harus terus ditingkatkan, terutama daerah-daerah yang sulit terjangkau dengan sumber air minum yang layak. Selain itu, edukasi terhadap penduduk untuk selalu menggunakan air minum yang layak dalam kehidupan sehari-hari harus terus ditingkatkan.

Rasio Elektrifikasi

Berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 78,93 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 21,07 persen rumah tangga yang belum memperoleh akses jaringan listrik PLN. Angka ini meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 54,69 persen rumah tangga yang dapat menikmati listrik PLN. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah sudah berhasil dalam meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan fasilitas listrik PLN.

Gambar 2.17.

Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN sebagai Sumber Utama Penerangan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016-2019



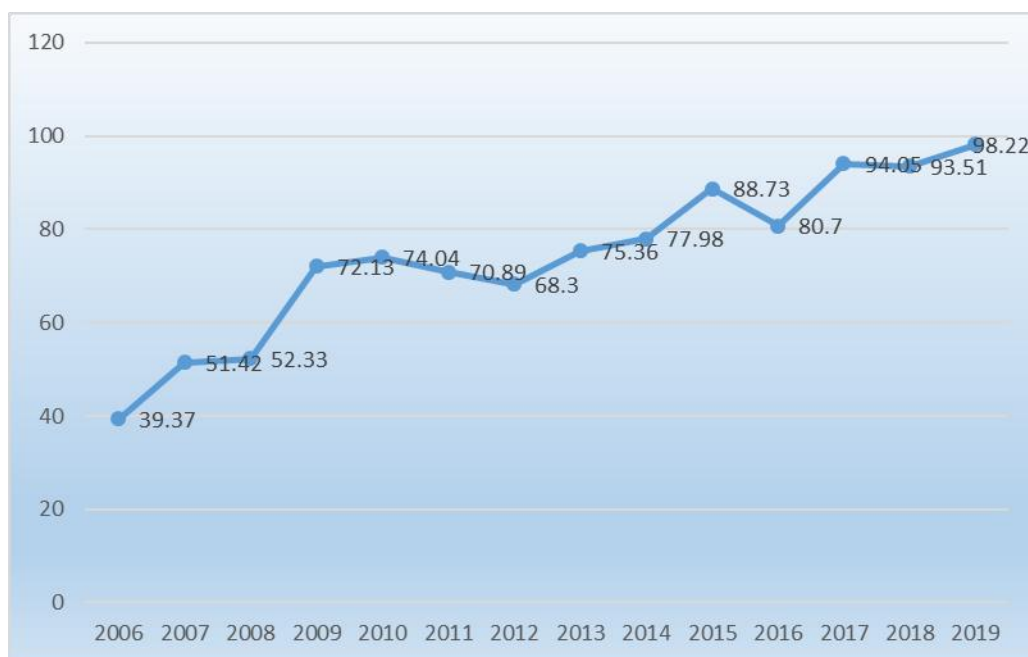
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali diantaranya adalah tersediaanya sarana penerangan listrik. Di Kabupaten OKU Selatan, selain menggunakan listrik PLN masyarakat juga banyak menggunakan listrik yang dibangun dengan swadaya sendiri yang disebut Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau yang lebih kecil lagi dengan sebutan turbin.

Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai penerangan juga meningkat dari tahun 2006 - 2019, dari angka 39,37 persen menjadi 98,22 persen. Kenaikan ini sangat signifikan meningkat sebesar lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan Kabupaten OKU Selatan sudah mengalami banyak pembangunan di sektor fasilitas listrik.

Gambar 2.18.

Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Listrik (persen)
Tahun 2006 - 2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

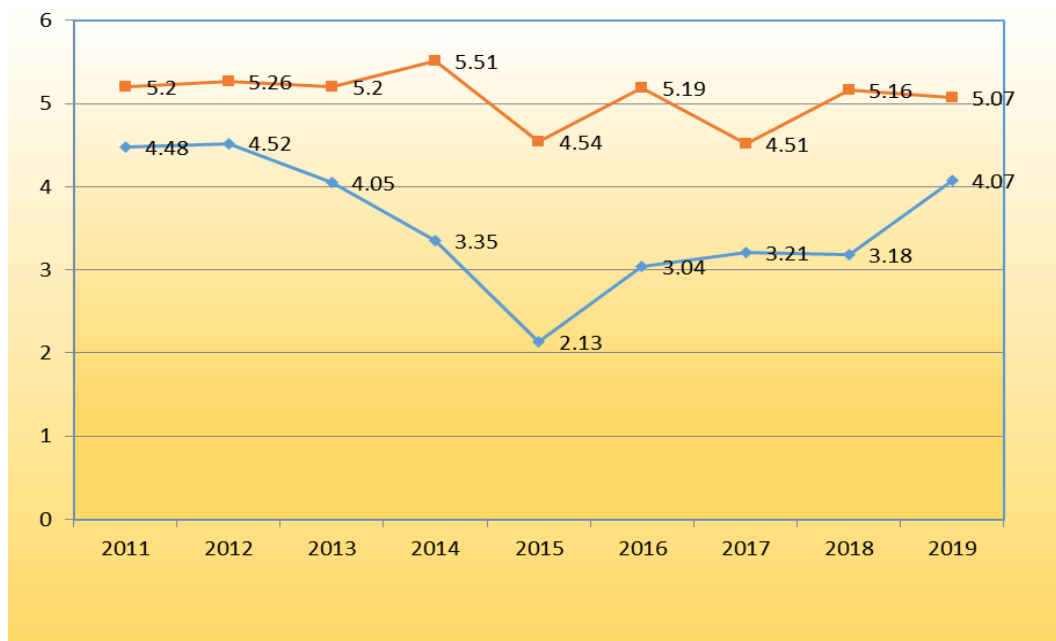
2.3.5. Bidang Ekonomi

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan rata-rata dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Semakin besar pertumbuhan ekonomi menggambarkan semakin baiknya tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Gambar 2.19.

Perbandingan Pertumbuhan Sektor Pertanian dengan Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2011 - 2019



Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan

Pertumbuhan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang memiliki distribusi paling besar dalam perekonomian menunjukkan perkembangan yang sempat menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2015, yang mencapai titik terendah 2,13 persen. Sedangkan pada tahun berikutnya menunjukkan kenaikan sampai dengan tahun 2019 sebesar 4,07 persen. Pada rentang waktu yang sama pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,51 – 5,51 persen. Titik terendah pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 4,51 persen, sedangkan pada tahun 2015 dimana sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,54 persen.

Tabel. 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten OKU Selatan (Persen)
Tahun 2012 - 2019

Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016 ^r	2017	2018 ^x	2019 ^{xx}
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,52	4,05	3,35	2,13	3,04	3,21	3,18	4,07
B	Pertambangan dan Penggalian	7,09	5,06	6,08	7,18	1,9	5,12	6,58	7,01
C	Industri Pengolahan	5,03	6,99	7,26	2,45	4,29	8,81	6,01	9,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,63	14,31	11,1	11,43	20,51	8,1	7,06	9,26
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,09	4,56	6,5	8,69	4,14	10,01	9,47	9,98
F	Konstruksi	3,46	6,48	4,86	4,35	6,52	6,81	7,83	5,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	6,27	8,32	10,49	7,61	2,01	6,74	6,43
H	Transportasi dan Pergudangan	16	9,26	8,57	4,81	4,47	0,52	7,33	6,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,6	8,21	8,94	8,58	9,96	6,96	8,32	12,21
J	Informasi dan Komunikasi	20,7	11,94	8,35	8,76	8,81	8,66	10,86	9,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,38	11,13	6,44	5,33	4,06	2,01	2,82	1,08
L	Real Estat	15,06	11,88	7,43	4,09	8,26	6,9	7,02	7,17
M,N	Jasa Perusahaan	4,96	3,39	8,63	5,13	12,71	11,27	8,88	6,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,12	-3,1	4,12	3,46	3,76	5,39	3,48	1,49
P	Jasa Pendidikan	14,74	8,78	13,18	6,6	8,99	5,69	2,84	- 0,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,11	3,59	6,33	3,61	5,72	6,08	3,44	6,61
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-2,94	-0,24	-0,13	4,75	6,3	8,27	5,56	5,72
	Produk Domestik Regional Bruto	5,26	5,2	5,51	4,54	5,19	4,51	5,16	5,07

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Selatan terus menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2011 hingga 2019. Pada tahun 2019, walaupun angka pertumbuhan di atas 5 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,09 persen. Sektor pertanian yang merupakan mayoritas lapangan usaha yang dilakukan penduduk ternyata pertumbuhan ekonominya kecil hanya 4,07 persen. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten OKU Selatan dengan kontribusi yang paling besar, akan tetapi sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang kecil bila dibandingkan dengan sektor lain. walaupun sektor ini mengalami kenaikan pertumbuhan dari tahun 2018 – 2019 dari angka 3,18 persen menjadi 4,07 persen.

2.4. Diagnosa Kemiskinan dan Dimensinya

Dari pembahasan mengenai kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan beserta dimensi-dimensinya, sehingga dapat disimpulkan kondisi kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10. Analisa Prioritas Sasaran Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Bidang	Indikator Utama	Hasil Analisa			
			Efektifitas	Posisi terhadap Rata-rata Nasional	Posisi terhadap Rata-rata Provinsi	Relevansi Perkembangan
1	Kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Menurun ✓	Di bawah ✓	Di bawah ✓	Cukup Relevan ✓
2	Tenaga kerja	Tingkat Pengangguran	Menurun ✓	Di bawah ✓	Di bawah ✓	Relevan ✓
3	Kesehatan	Angka morbiditas	Menurun ✓	Di bawah ✓	Di bawah ✓	Relevan ✓
		Angka Persentase Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	Meningkat ✓	Di bawah ✓	Di Bawah ✓	Relevan ✓
4	Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Meningkat ✓	Di bawah ✓	Di atas ✓	Cukup relevan ✓

No	Bidang	Indikator Utama	Hasil Analisa			
			Efektifitas	Posisi terhadap Rata-rata Nasional	Posisi terhadap Rata-rata Provinsi	Relevansi Perkembangan
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Meningkat ✓	Di bawah ✓	Di Bawah ✓	Relevan ✓
		Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Meningkat ✓	Di bawah ✓	Di atas ✓	Cukup relevan ✓
		Angka Buta Huruf	Menurun ✓	Di bawah ✓	Di bawah ✓	Cukup relevan ✓
5	Infrastruktur dasar	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Meningkat ✓	Di bawah x	Di bawah x	Cukup relevan ✓
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Meningkat ✓	Di atas ✓	Di bawah x	Cukup relevan ✓
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Jaringan Listrik	Meningkat ✓	Di atas ✓	Di bawah x	Cukup relevan ✓
6	Ekonomi	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Menurun ✓	Di bawah x	Di atas ✓	Cukup relevan ✓

Sumber: Hasil Analisa, 2019

Dari tabel di atas, terlihat bahwa bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan ekonomi masih memerlukan perhatian khusus dengan beberapa indikator utama harus menjadi catatan khusus agar dapat diperbaiki di masa mendatang.

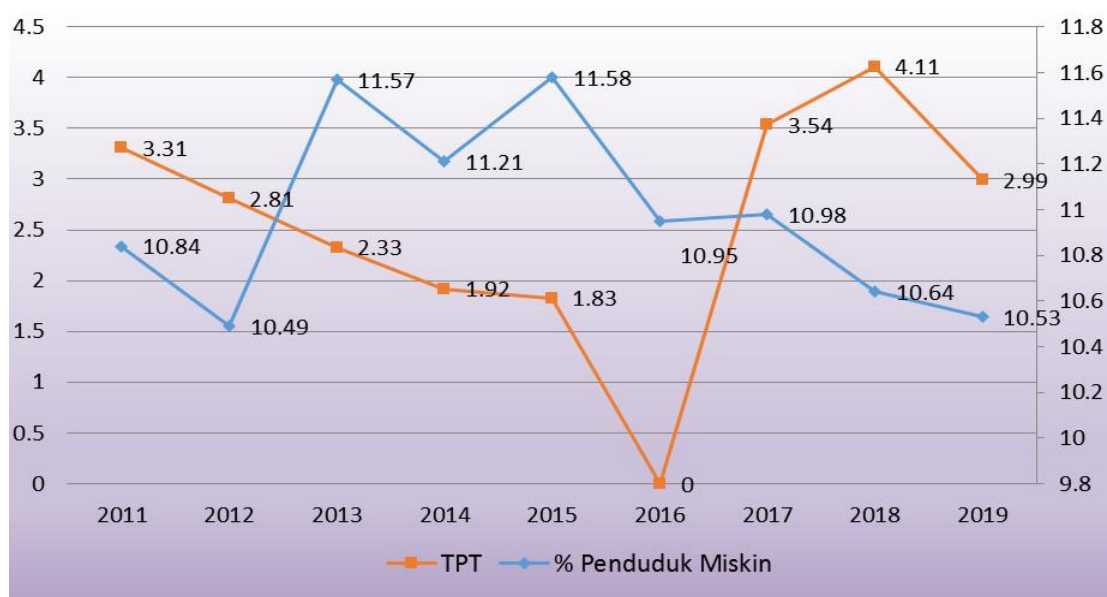
BAB III

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Prioritas Bidang Ketenagakerjaan

Gambar 3.1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan

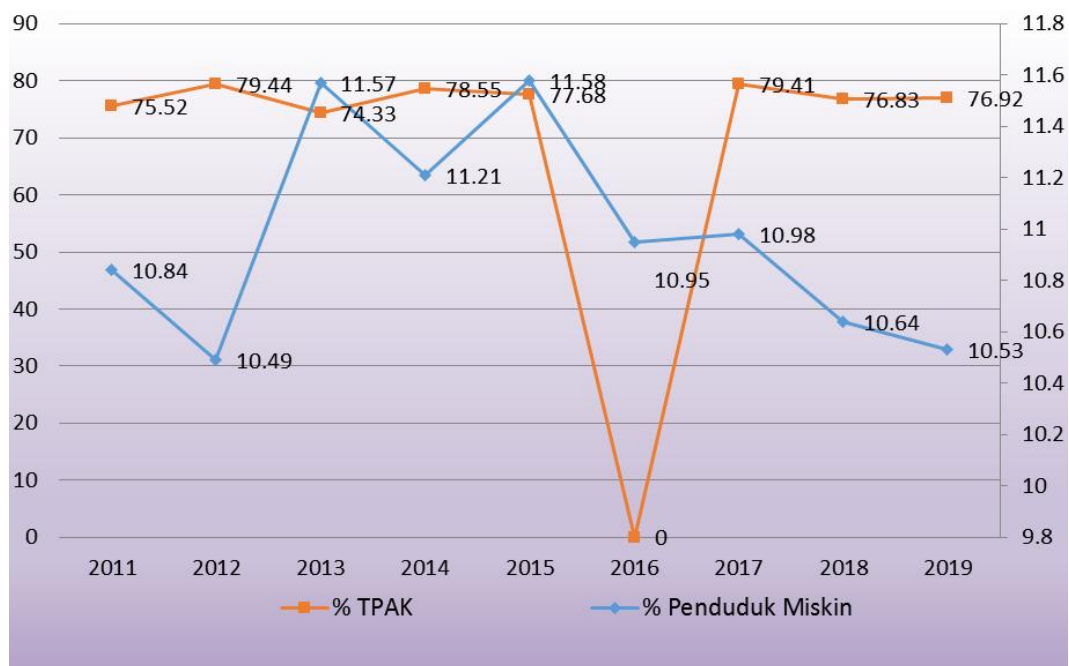
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari tahun 2011 sampai 2015 selalu mengalami penurunan dan hal ini tidak sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan pada periode yang sama yang bersifat fluktuatif. Sama halnya dengan TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan pada tahun 2019 sementara angka kemiskinan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan tidak adanya keterkaitan antara TPT dengan tingkat kemiskinan.

Gambar 3.2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



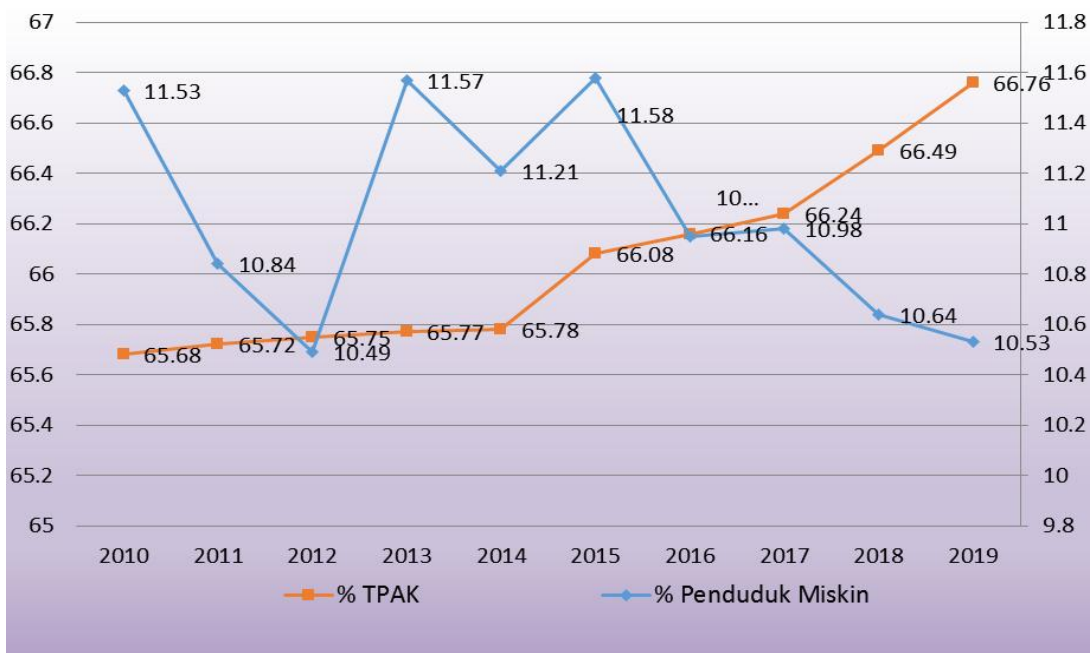
Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

3.2. Prioritas Bidang Kesehatan

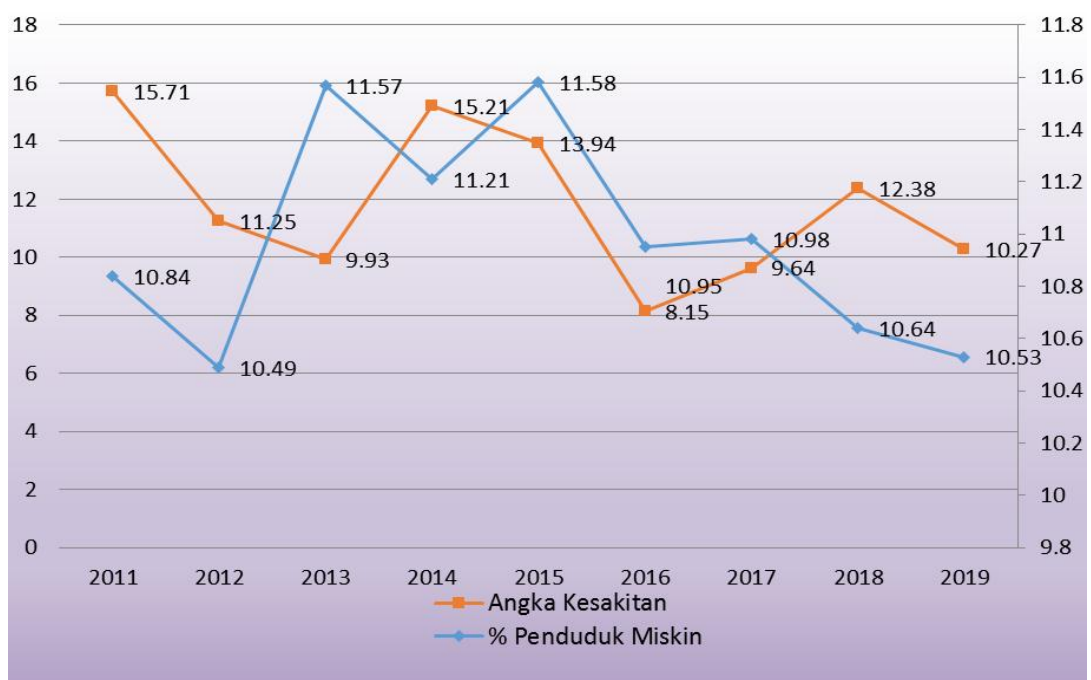
Angka harapan hidup (AHH) dan angka morbiditas memiliki tren penurunan persentase kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan cenderung fluktuatif pada tahun 2010 sampai 2019. Sementara itu pada tahun 2019 angka harapan hidup terjadi peningkatan yang diimbangi dengan penurunan tingkat kesakitan. Sedangkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara AHH dan angka Kesakitan dengan tingkat kemiskinan dikarenakan pada tahun tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan angka kemiskinan tidak selalu diiringi oleh penurunan angka kesakitan.

Gambar 3.3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan

Angka Harapan Hidup



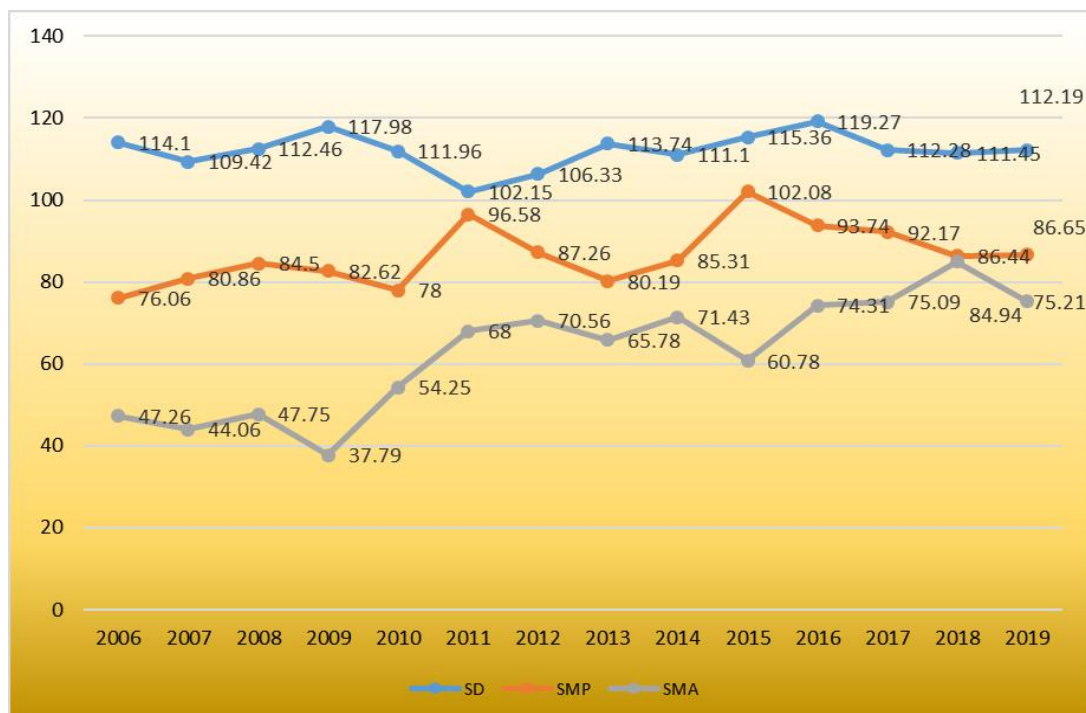
Gambar 3.4. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Angka Kesakitan



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

3.3. Prioritas Bidang Pendidikan

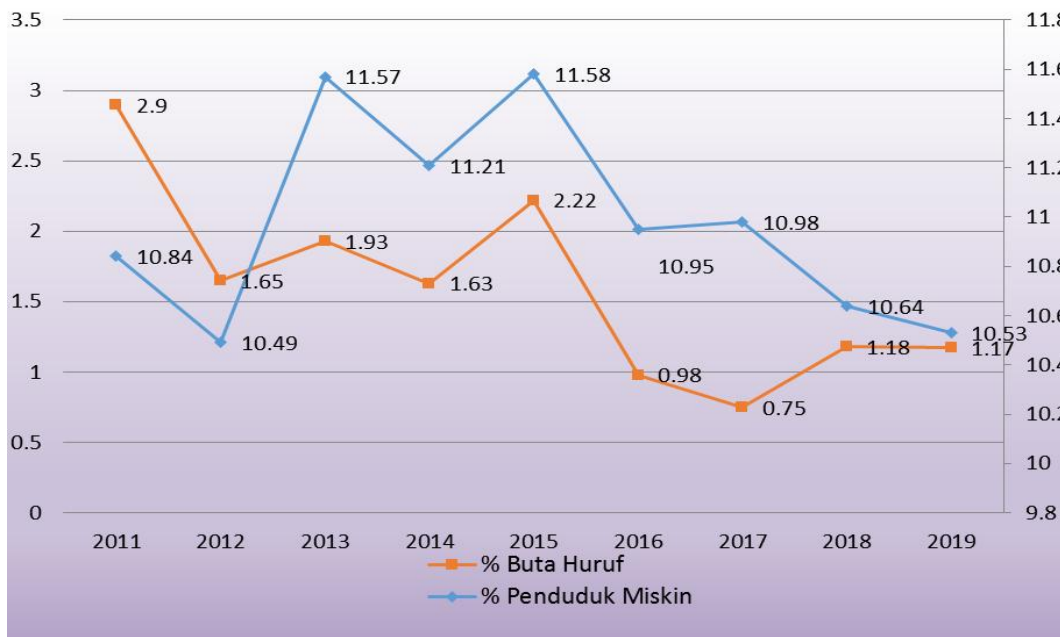
Gambar 3.5. Perbandingan APK SD, SMP, SMA



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Angka buta huruf (ABH) cenderung tren penurunan dari tahun 2006 sampai dengan 2019 walaupun pada tahun tersebut terjadi naik turun. Sedangkan angka partisipasi sekolah SD, sudah mencapai lebih dari 100 persen semenjak tahun 2006. APK SMA mengalami kenaikan yang sangat paling signifikan semenjak tahun 2006 – 2019 dari angka 47,26 menjadi 75,21. Walaupun pada rentang waktu tersebut mengalami naik dan turun. Sama halnya dengan APK SMA, APK SMP juga mengalami kenaikan dari tahun 2006 – 2019 dan memiliki tren yang naik. Hal itu sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan pada periode yang sama. Tingkat kemiskinan fluktuatif pada periode itu tetapi tetap menunjukkan tren menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara ABH dan angka partisipasi sekolah SD, SMP maupun SMA dengan tingkat kemiskinan.

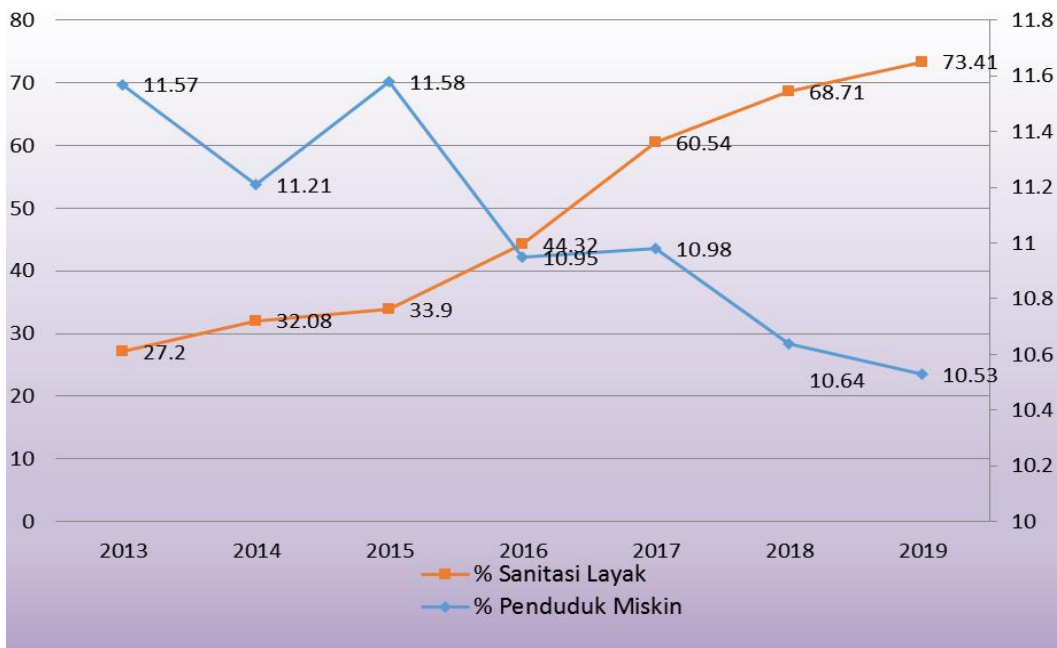
Gambar 3.6. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Angka Buta Huruf



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

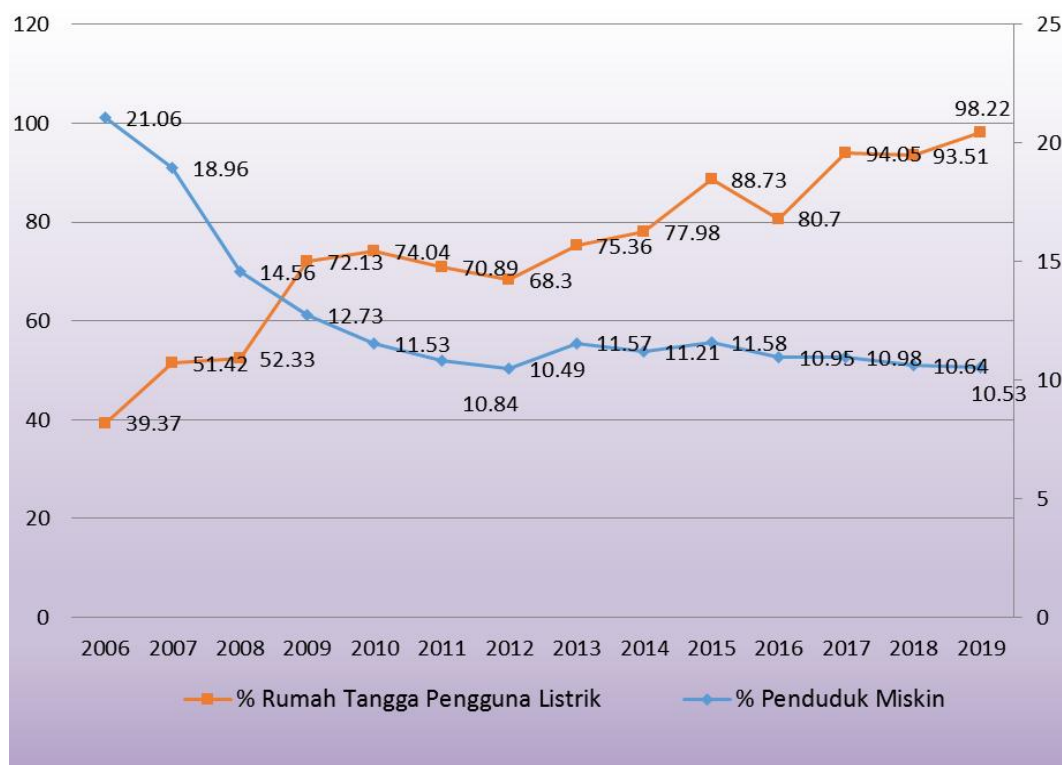
3.4. Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar

Gambar 3.7. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Sanitasi Layak



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Gambar 3.8. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Sumber Penerangan Listrik

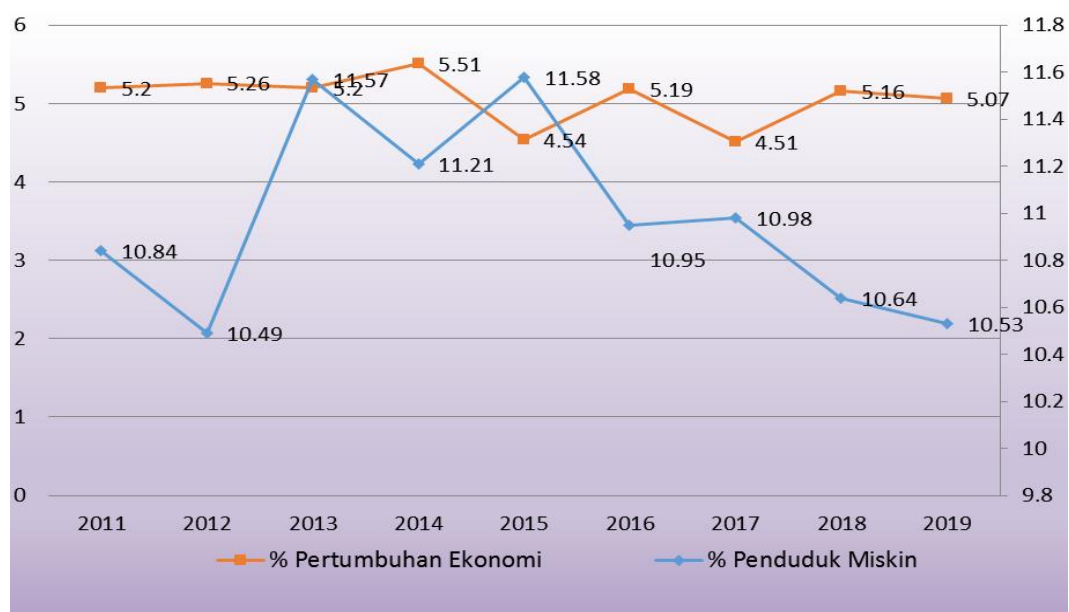


Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Persentase rumah tangga dengan air minum layak, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak dan persentase rumah tangga dengan akses jaringan listrik cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan pada periode yang sama. Walaupun tingkat kemiskinan fluktuatif pada periode itu tetapi tetap menunjukkan tren menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara persentase rumah tangga dengan air minum layak, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak dan persentase rumah tangga dengan akses jaringan listrik dengan tingkat kemiskinan.

3.5. Prioritas Bidang Ekonomi

Gambar 3.9. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Indikator Intervensi Bidang Ekonomi



Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKU Selatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2010 – 2019. Hal itu sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan pada periode yang sama. Tingkat kemiskinan fluktuatif pada periode itu tetapi tetap menunjukkan tren menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diduga berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini menunjukkan peningkatan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan tingkat kemiskinan justru mengalami penurunan walaupun sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penurunan penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan perekonomian. Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menyebabkan turunnya penduduk miskin

10,64 persen yang sebelumnya sebesar 10,98 persen pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 tingkat kemiskinan turun menjadi 10,53 persen berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang masih dalam tren positif diangka 5,07 persen yang turun sedikit dari 5,16 persen pada tahun 2018.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan Peraturan Presiden R.I No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa, visi pembangunan nasional adalah : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, telah menetapkan “Penanggulangan Kemiskinan” merupakan salah satu dari 11 prioritas nasional yang memproyeksikan sasaran tingkat kemiskinan sebesar 8 – 10 persen pada akhir tahun 2019.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009 tentang Penanggulan Kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak

dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Sejalan dengan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di OKU Selatan juga mengacu pada tiga jalur strategi pembangunan yaitu:

- a) Pro-Pertumbuhan (*pro-growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim investasi.
- b) Pro-Lapangan Kerja (*pro-job*), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif.
- c) Pro-Masyarakat Miskin (*pro-poor*), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi perdesaan.

4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai dasar gerak langkah penanggulangan kemiskinan yang diupayakan semakin sejahteranya keluarga miskin yang berimbas secara otomatis semakin berkurangnya angka kemiskinan, terdapat kerangka pikir (*frame of thinking*) bahwa untuk memacu kemandirian sosial dan ekonomi RTSM perlu adanya proses pemberdayaan (*empowering proces*). Oleh sebab itu program-

program yang bersifat pemberdayaan diperlukan adanya pendampingan bagi rumah tangga sasaran keluarga miskin guna percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan pula sinergitas antar program yang dapat dilakukan dengan adanya kejelasan dan keterpaduan kelompok sasaran, didukung oleh pihak kecamatan, desa/kelurahan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan membina para keluarga miskin untuk berperan aktif dalam kelompok RTS tersebut, dengan demikian di setiap desa dan kelurahan harus mampu membuat simpul kelompok-kelompok tersebut sebagai upaya mengoptimalkan proses pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan perekonomian keluarga miskin, sosial dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur.

Kemiskinan harus ditangani dari berbagai dimensi; ekonomi, akhlak dan keilmuan. Upaya pembangunan harus berorientasi pada pembangunan manusia. Pengembangan skema-skema pengurangan dan pengentasan kemiskinan yang merujuk pada prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Artinya ada pembagian peran masing-masing masyarakat yang merancang dan menjadi pelaku utama. Pemerintah menyiapkan peluang-peluang bagi masyarakat, menjaga kebersamaan dan memelihara lingkungan dan kondisi yang kondusif. Kalangan dunia usaha menerapkan bahwa pembangunan masyarakat merupakan suatu investasi bagi keberlanjutan kegiatan usahanya. Kelompok-kelompok sosial budaya kemasyarakatan mendorong peningkatan kemampuan dan pengayaan (enrichment) kemampuan masyarakat.

Secara nasional maupun di tingkat daerah, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

4.2.1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil. Tingginya tingkat kerentanan menyebabkan tingginya kemungkinan penduduk menjadi miskin. Untuk mencegah semakin besarnya kemungkinan itu, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. Di lain pihak, jaminan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi goncangan (*shocks*) dalam kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. Sistem jaminan sosial yang efektif akan mengantisipasi kemungkinan individu atau masyarakat yang mengalami goncangan tersebut menjadi jatuh miskin.

Program perlindungan sosial masyarakat dan merupakan bantuan langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban hidup rumah tangga/keluarga/penduduk miskin. Program – program yang termasuk dalam klasifikasi perlindungan sosial, meliputi :

- a) Raskin
- b) Program Keluarga Harapan
- c) Pelayanan Sosial Bagi Lansia
- d) Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar
- e) Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Berat

- f) Program Penyandang Cacat
- g) Program Lanjut Usia
- h) Program Kesejahteraan Anak Terlantar
- i) Program Kesejahteraan Sosial Balita Terlantar
- j) Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan
- k) Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
- l) Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- m) Program Korban NAPZA
- n) Program Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

4.2.2. Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar

Prinsip kedua adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin yang terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang bidang ini efektif untuk mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinan.

Kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang cukup sangat mungkin untuk tetap miskin

sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan kunci peningkatan investasi modal manusia. Status kesehatan yang lebih baik, akan meningkatkan produktivitas penduduk miskin dalam bekerja dan berusaha. Hal ini akan memperbesar peluang mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan.

Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan unsur penting dalam memperbaiki derajat kesehatan. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Program pemenuhan kebutuhan dasar ada di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi dan mempermudah akses terhadap kebutuhan dasar penduduk/masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Program – program yang termasuk dalam klasifikasi pelayanan dasar, meliputi :

- a) Bantuan Operasional Sekolah
- b) Perumahan Layak Huni
- c) Beasiswa bagi Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs
- d) Gizi Anak Sekolah
- e) Beasiswa Miskin SMA/SMK/MA dan PT
- f) Jamkesmas & Jamkesda
- g) Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas
- h) Revitalisasi Program KB
- i) Program Penderita Penyakit Katastropik

- j) Program Penurunan Angka Kemiskinan dan Kelaparan
- k) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- l) Program Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI
- m) Program Mencapai Pendidikan Untuk Semua
- n) Program Penurunan Angka Kematian Anak
- o) Program Penurunan Angka Kematian Ibu
- p) Program Kependudukan & Keluarga Berencana
- q) Program Pengendalian Penyakit HIV/AIDS, Malaria, dan TB
- r) Program Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Air Minum yang Layak
- s) Program Pengelolaan Sumberdaya Air
- t) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman
- u) Program Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sanitasi Dasar Layak

4.2.3. Memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin di masing-masing daerah.

Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan peranan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Program –

program yang termasuk dalam klasifikasi pemberdayaan masyarakat, meliputi :

1. Pemberdayaan UMKM
2. PNPM Mandiri
3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
4. Program Komunikasi Adat Terpencil (KAT)
5. Program Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
6. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis Pemberdayaan
7. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
8. Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
9. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
10. Program Gerakan Membangun Serasan Seandanan.

4.2.4. Pembangunan yang Inklusif

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan dampak penggandaan (*multiplier effect*) pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk kemudahan ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya UMKM harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berlainan. Perekonomian daerah ini pada gilirannya akan membentuk karakteristik perekonomian nasional, dan oleh sebab itu pengembangan ekonomi lokal penting untuk memperkuat ekonomi nasional.

Pembangunan yang eksklusif merupakan program dukungan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, investasi, stabilitas harga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta beberapa program peningkatan aksesibilitas masyarakat lainnya. Program – program yang termasuk dalam klasifikasi pembangunan ekonomi yang inklusif, meliputi :

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan

Kawasan Hutan

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas unggul berdaya saing.
6. Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
7. Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
8. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah
9. Program Pengelolaan dan Pelayanan Transportasi Darat.

4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi (Peraturan Presiden No 15 tahun 2010).

Berdasarkan Pasal 3 Perpres No 15 tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres No. 96 Tahun 2015, bahwa Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan :

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Beberapa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang tertuang dalam Perpres No 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015 juga dijadikan patokan bagi Pemerintah OKU Selatan. Pencapaian target tersebut dilakukan melalui upaya-upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat miskin, meningkatkan akses dan mutu pelayanan dan infrastruktur dasar, serta meningkatkan usaha rakyat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, yang secara operasional dilakukan dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan.

Klaster pertama, yakni dengan memberikan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu, melalui Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). **Klaster kedua**, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri) dan Program Gerakan Membangun Serasan Seandanan. **Klaster ketiga**, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kelompok atau klaster program penanggulangan pertama yakni program bantuan sosial terpadu berbasis rumahtangga, hanya bersifat memberikan sesuatu (*charity*) agar masyarakat miskin dapat mengurangi beban hidupnya. Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi penekanan agar tidak muncul atau meluasnya masyarakat yang menjadi miskin. Oleh sebab itu, strategi perbaikan dan perluasan program perlindungan sosial ini memiliki maksud untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (*shocks*) dalam

kehidupan seperti ketidakmampuan membiayai sekolah, biaya pengobatan/kesehatan, ditimpa bencana atau bencana alam, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan yang sesuai dengan tersedianya anggaran untuk klaster pertama ini adalah pembelian raskin bagi masyarakat miskin dengan pagu yang sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik hasil Pendataan Program Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.

Klaster kedua, berupa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, memiliki peranan penting dalam menumbuhkan kemampuan seseorang, keluarga ataupun kelompok agar bisa mandiri, sehingga klaster ini diprediksi akan mampu mendukung terhadap pengurangan penduduk miskin secara signifikan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu program untuk mengurangi beban keluarga atau rumah tangga miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Program PKH terbagi menjadi 4 tahap dengan jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 52,23 milyar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2019 semua Kecamatan mendapatkan bantuan, dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahap I sebanyak 14.946 KPM dengan total bantuan sebesar Rp. 19.739.975.000,00 Tahap II sebanyak 14.871 KPM dengan total bantuan sebesar Rp. 11.572.900.000,00 Tahap III sebanyak 14.814 KPM dengan total bantuan sebesar Rp. 12.262.525.000,00 dan Tahap IV sebanyak 14.526 KPM dengan total bantuan sebesar Rp. 8.652.125.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan PKH

Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah KPM				Jumlah Bantuan (rupiah)
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Banding Agung	937	926	923	899	3,130,200,000
2.	Buana Pemaca	1051	1048	1,042	1004	3,651,750,000
3.	Buay pemaca	1266	1262	1,253	1236	4,506,800,000
4.	Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	843	843	843	842	3,121,800,000
5.	Buay Rawan	480	478	494	476	1,664,025,000
6.	Buay Runjung	490	487	483	469	1,658,150,000
7.	Buay Sandang Aji	987	982	972	960	3,339,275,000
8.	Kisam Ilir	307	304	304	297	961,225,000
9.	Kisam Tinggi	476	476	466	460	1,473,500,000
10.	Mekakau Ilir	1100	1099	1,093	1072	3,875,450,000
11.	Muaradua	948	943	947	929	3,442,650,000
12.	Muaradua Kisam	494	492	494	488	1,601,825,000
13.	Pulau Beringin	1546	1539	1,536	1509	5,870,075,000
14.	Runjung Agung	537	537	534	525	1,747,650,000
15.	Simpang	686	687	683	668	2,429,950,000
16.	Sindang Danau	720	711	703	691	2,538,150,000
17.	Sungai Are	671	671	668	662	2,390,825,000

No.	Kecamatan	Jumlah KPM				Jumlah Bantuan (rupiah)
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	Tiga Dihaji	519	519	517	487	1,701,650,000
19.	Warkuk Ranau Selatan	888	867	859	852	3,122,575,000
Jumlah		14.946	14.871	14.814	14.526	52.227.525.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten OKU Selatan

Program Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program bantuan pemberdayaan sosial langsung tunai ini termasuk salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Sosial yang bersumber dari dana APBN dan diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin. Pada tahun 2019, telah diserahkan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana pada tahun ini tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 500 KK.

Tabel 4.2

Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Penerima Manfaat (KK)	Jumlah Bantuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Banding Agung	Merbau	40	80.000.000
2.	Mekakau Ilir	Kota Dalam	40	80.000.000
3.	Pulau Beringin	Tanjung Bulan	20	40.000.000
		Tanjung Bulan Ulu	20	40.000.000
		Pulau Beringin	20	40.000.000

No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Penerima Manfaat (KK)	Jumlah Bantuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Aromantai	20	40.000.000
		Simpang Pancur	20	40.000.000
		Tanjung Kari	20	40.000.000
		Pulau Beringin	20	40.000.000
4.	Buay Runjung	Kagelang	10	80.000.000
5.	Tiga Dihaji	Kuripan 1	10	20.000.000
		Kuripan 2	10	20.000.000
		Karang Pendeta	10	20.000.000
		Sukabumi	10	20.000.000
6.	Sindang Danau	Tebat Layang	40	80.000.000
		Pematang Danau	40	80.000.000
		Muara Sindang Tengah	10	10.000.000
		Muara Sindang Ilir	10	10.000.000
7.	Kisam Tinggi	Padang Bindu	20	40.000.000
		Ulak Pandan	10	20.000.000
		Pulau Panggung	20	40.000.000
		Pajar Bulan	10	20.000.000
		Bandar Alam Lama	10	20.000.000
		Danau Rata	20	40.000.000
		Tebat Gabus	10	20.000.000
Jumlah			500	1.000.000.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten OKU Selatan

Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Tidak Mampu

Program bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu ini sudah menjadi kegiatan rutin Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Selatan guna mensejahterakan masyarakat dengan melalui dana APBD dan disalurkan oleh

Dinas Sosial kepada orang/keluarga yang kurang mampu. Adapun kegiatan yang lebih jelasnya dapat dilihat pada masing-masing Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Penerima Bantuan Tunai untuk Orang Dengan Kecacatan (ODK)

Di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah Penerima Manfaat (Org)	Jumlah Bantuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muaradua	Pasar Muaradua	1	2.400.000
		Pendagan	1	2.400.000
2.	Sindang Danau	Ulu Danau	6	14.400.000
		Muara Sindang	8	19.200.000
3.	Buay Sandang Aji	Negeri Agung	1	2.400.000
		Negeri Batin	4	9.600.000
		Tanjung Iman	2	4.800.000
		Kenali	2	4.800.000
		Tanjung Raya	5	12.000.000
		Sukarami	11	26.400.000
		Madura	11	26.400.000
4.	Buay Pemaca	Sumber Raya	1	2.400.000
5.	Tiga Dihaji	Kuripan	13	31.200.000
		Sukarena	2	4.800.000
		Peninggiran	2	4.800.000
		Kuripan I	1	2.400.000
		Karang Pendeta	1	2.400.000
6.	Kisam Tinggi	Kota Padang	7	16.800.000
		Muara Payang	2	4.800.000
		Padang Bindu	2	4.800.000
		Tebat Gabus	2	4.800.000
Total			85	204.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten OKU Selatan

Program Pengembangan Perumahan

Sasaran yang dituju oleh Pemerintah Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga diharapkan terjadinya peningkatan kualitas rumah masyarakat dari yang tidak layak huni menjadi layak huni. Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu ini bersumber dari dana APBN. Pelaksanaan tahun 2019 hanya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Buay Sandang Aji dan Kecamatan Runjung Agung. Untuk lebih jelasnya, jumlah penerima manfaat serta lokasinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah (Rumah Layak Huni)
di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah Penerima Manfaat (KK)	Jumlah Bantuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Buay Sandang Aji	Kota Karang	47	822.500.000
		Madura	75	1.312.500.000
2.	Runjung Agung	Penanggungan	100	1.750.000.000
		Karang Endah	28	490.000.000
Total			250	4.375.000.000

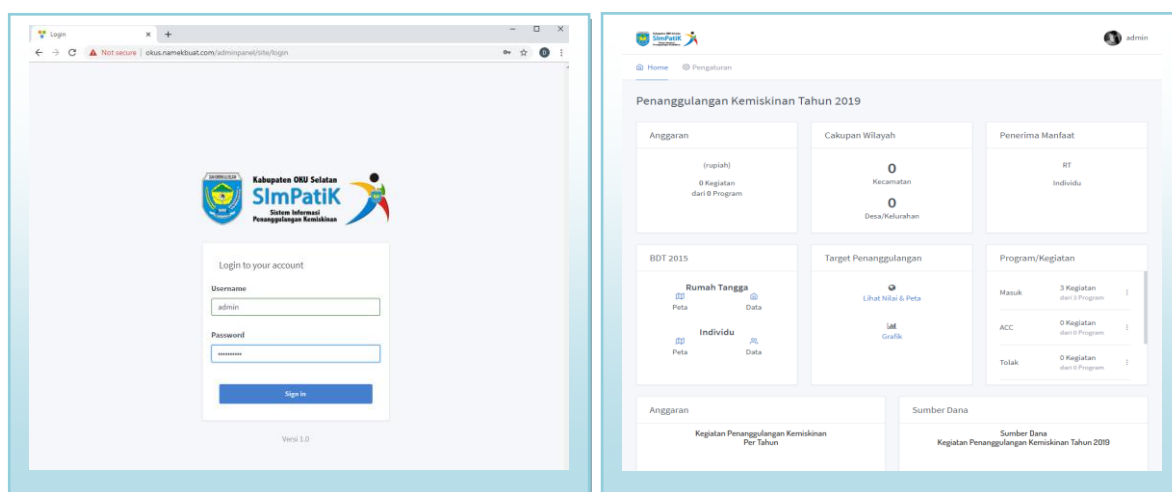
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.4. Inovasi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan

Berawal dari lahirnya sebuah aplikasi e-kemiskinan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada akhir tahun 2017, kemudian diterapkannya pada seluruh kabupaten/kota se Sumatera Selatan di tahun 2018, maka Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berinisiatif untuk mengadakan aplikasi e-kemiskinan ini secara mandiri.

Sehingga pada tahun 2019 ini, lahirnya aplikasi e-kemiskinan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang bernama “SimPatiK” namun tetap terintegrasi dengan aplikasi e-kemiskinan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penggunaan SIMPATIK ini diharapkan akan lebih mempermudah serta akurat dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan pada program/kegiatan kemiskinan sehingga mampu dengan cepat dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Gambar 4.1. Tampilan Aplikasi Kemiskinan SIMPATIK Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019



Sumber : Bappeda Litbang Kab. OKU Selatan

BAB V

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Upaya kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dititikberatkan pada optimalisasi dan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 mengamanatkan adanya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan ke dalam 3 (tiga) kelompok program yaitu:

1. Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
2. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat (instrumen: PNPM mandiri).
3. Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan penyempurnaan dari Perpres nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 diberlakukan dengan tujuan:

1. Mempercepat target penurunan jumlah penduduk miskin (MDGs 2018 dan PJP 2025).
2. Meningkatkan efektifitas koordinasi (sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi) upaya penanggulangan kemiskinan melalui 3 kelompok/klaster program.

3. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun daerah.
4. Mendorong upaya penanggulangan kemiskinan sebagai program bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009) akan melahirkan **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)**. TKPK akan bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Keanggotaan TKPK secara nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Secara rinci, tugas dan fungsi TKPK Provinsi Dan Kab/Kota adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- Pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan RPJMD dibidang Penanggulangan Kemiskinan;
- Pengoordinasian Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD di Bidang Penanggulangan Kemiskinan dlm hal penyusunan Renstra SKPD, penyusunan Rancangan RKPD, dan penyusunan Renja SKPD;
- Pengevaluasian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan.

2. Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

- Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyampaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan;
- Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh SKPD;
- Penyusunan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program Dan Atau Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Regular; Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan.

Pada hakekatnya, konsep penurunan keluarga miskin ini tidak hanya melibatkan dinas dan badan terkait, namun diupayakan peran camat beserta jajarannya serta masyarakat harus terlibat aktif pada seluruh program penanggulangan kemiskinan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian, agar angka penurunan kemiskinan dapat terpantau setiap saat, maka sudah menjadi keharusan adanya anggaran kegiatan bagi proses pendataan, mulai kegiatan pengolahan data (*entry data*) sampai dengan verifikasi data. Khusus untuk tingkat kabupaten, lebih berfokus pada proses pengendalian data kemiskinan sehingga dapat dievaluasi dalam kurun waktu tertentu.

5.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan rapat koordinasi di daerah masing-masing secara periodik.

Rapat Periodik di tingkat Kabupaten dilaksanakan antar SKPD Kabupaten dan Instansi terkait penanggulangan kemiskinan sesuai dengan SK TKPK Kabupaten termasuk BUMN, BUMD dan Swasta minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

5.1.2. Koordinasi dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat

Koordinasi dengan tingkat pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Di tahun 2011 TKPK Kabupaten OKU Selatan telah melaksanakan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten dengan TKPK Tingkat Provinsi dengan melakukan koordinasi kemajuan TKPK Kabupaten dan Kordiansi Laporan Triwulan TKPK OKU Selatan. Pada tahun 2012 TKPK Kabupaten OKU Selatan mengikuti pelatihan dan magang penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) yang dibantu oleh Tim Advokasi Pusat dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dukungan tingkat pusat terhadap TKPK Kabupaten diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM yang diawali dengan pelatihan pengelolaan data dan informasi untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan.

5.1.3. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih perlu disempurnakan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah diharapkan menjadi lokomotif dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap kemiskinan.

TKPKD Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan analisis kemiskinan di daerahnya masing-masing dan kemudian merumuskan program serta anggaran yang memprioritaskan penanganan kemiskinan. TKPK daerah juga menjadi koordinator dan pengendali berbagai macam program penanggulangan kemiskinan di daerah agar program-program tersebut tidak bertabrakan dan saling bersinergi. Dan program-program dari Pemerintah Pusat bukan satu-satunya cara untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah daerah juga dapat menyusun program yang lebih tepat dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan, yaitu :

- Belum optimalnya komitmen dan konsistensi daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- Belum terpadunya program-program penanggulangan kemiskinan sehingga sering terjadi bias sasaran, target dan lokasi.
- Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

- Belum semua daerah membuat target kemiskinan dalam RPJMD
- Masih lemahnya koordinasi, baik antar instansi terkait maupun antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten maupun antara Kabupaten dengan Pusat.

5.2. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

5.2.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah

Tangga

Program ini mempunyai tujuan mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses dasar terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi layak. Program ini juga disebut Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I yang sarasannya adalah individu berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Beberapa Program Klaster I (satu) yang ada di Kabupaten OKU Selatan diantaranya :

- a. Raskin
- b. Jamkesmas
- c. Jampersal
- d. Bantuan Operasional Sekolah
- e. Program Keluarga Harapan
- f. Sekolah Gratis OKU Selatan
- g. Berobat Gratis OKU Selatan (Jamsoskes) dan
- h. Bantuan Hukum Gratis OKU Selatan

5.2.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Program ini juga disebut Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II yang sarannya adalah masyarakat atau komunitas yang berbasis pemberdayaan. Beberapa Program Klaster II (dua) yang ada di Kabupaten OKU Selatan diantaranya :

- a. PNPM Perdesaan
- b. PNPM Perkotaan
- c. Pamsimas
- d. PUAP
- e. PNPM Pariwisata dan
- f. PNPM Kelautan Perikanan

5.2.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

Program ini mempunyai tujuan memberikan akses penguatan ekonomi dan akses permodalan bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program ini juga disebut Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III (tiga) yang sarannya adalah usaha mikro dan kecil. Program Klaster III (tiga) yang ada di Kabupaten OKU Selatan salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

5.2.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk Meningkatkan Akses Palayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat)

Program ini mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan "sesuatu" dengan harga murah dimana sebagian dibantu

atau di subsidi oleh pemerintah. Program ini juga disebut Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster IV (empat). Beberapa contoh program ini adalah Program rumah murah, Program angkutan umum murah, Program air bersih murah dan Program listrik murah & hemat.

5.2.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah

Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah di Kabupaten OKU Selatan telah dilakukan, beberapa program inisiatif daerah diantaranya adalah Sekolah gratis, Berobat Gratis, dan Bantuan hukum gratis.

5.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Pengaduan Masyarakat belum berjalan karena sampai saat ini belum ada pengaduan/komplain dari masyarakat terkait Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan.

5.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Jadwal pelaksanaan kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) periodik TKPK Kabupaten Kabupaten OKU Selatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 dan tahun 2019 :

Tahun 2018 :

1. Rapat Koordinasi TW I Sekretariat TKPKD dan SKPD terkait : tentang Teknis Penyusunan Laporan TKPK Kabupaten;
2. Rapat Sosialisasi TW II Sekretariat TKPK Kabupaten dan SKPD terkait;
3. Rapat Koordinasi TW III Sekretariat TKPKD dan SKPD terkait;
4. Rapat Koordinasi TW IV Sekretariat TKPK Kabupaten dan SKPD terkait.

Tahun 2019 :

1. Rapat Koordinasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Sehat (PIS) TKPD dan SKPD;
2. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 TKPKD dan SKPD ;
3. Rapat Forum Konsultasi Publik Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Program Pendataan Perlindungan Sosial SKPD terkait.

5.5. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program

Penanggulangan Kemiskinan

Perlu dilakukan lebih mendalam terkait penyempurnaan dan penajaman pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan serta mengoptimalkan TKPK dengan mengupayakan agar TKPK yang telah dibentuk lebih operasional. Dari beberapa permasalahan dan hambatan-hambatan yang telah disampaikan, beberapa rekomendasi dalam mengoptimalkan koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan dapat dijabarkan dan dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pendataan

- Penegasan kepada seluruh SKPD untuk menggunakan data kemiskinan dari BPS sebagai data dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- *Updating* data kemiskinan sampai kepada desa Peningkatan akses masyarakat pada data dan informasi kemiskinan
- Melakukan Analisis Kemiskinan di desa

- Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD) Kabupaten
- Membuat Target kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten .
- Keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten

b. Pendanaan

- Keterpaduan penganggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten
- Peningkatan dan pengembangan akses permodalan bagi UMKM
- Pengupayaan pembiayaan penanggulangan kemiskinan dari pihak ketiga (CSR)

c. Kelembagaan

- Penguatan kelembagaan TKPK Kabupaten
- Keterlibatan dunia usaha dan LSM
- Percepatan proses integrasi antara hasil perencanaan partisipatif (PNPM) dan perencanaan reguler (Musrenbang)

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, kedepannya kesalahan dan hambatan diatas harus segera dikoreksi dan dicarikan solusinya, salah satunya adalah dengan mengerahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah, Provinsi maupun Nasional, disamping itu harapan kedepan kiranya pemberian kewenangan kepada daerah di iringi dengan pendelegasian pembiayaan yang lebih proporsional, sehingga daerah dapat lebih leluasa melakukan percepatan pembangunan yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN RINGKASAN REKOMENDASI

6.1. Kondisi Umum Kemiskinan

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2018 sebesar 10,64 persen, berada di bawah tingkat kemiskinan nasional dan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan. Jika dilihat kondisinya dari waktu ke waktu, tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten OKU Selatan yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan memiliki tren menurun sejalan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional yang juga memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan relevan dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Kondisi relevan yang terjadi merupakan kondisi relevan yang membaik.

6.2. Diagnosis Permasalahan Kemiskinan dan Dimensinya

Dari berbagai kegiatan dilaksanakan dalam masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten OKU Selatan mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dari tahun 2005 sebesar 18,42 persen dan pada tahun

2018 tingkat kemiskinan penduduk OKU Selatan menjadi 10,64 persen.

2. Adapun jika dibandingkan dengan target angka kemiskinan yaitu 10,15 persen pada tahun 2018, pencapaian pengentasan kemiskinan nampaknya sudah mendekati target. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan harus berusaha lebih keras lagi dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan walaupun tingkat kemiskinan di kabupaten ini relatif lebih kecil daripada kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dari analisa program pada masing-masing bidang dengan menilai capaian terkait dengan masing-masing indikator untuk menanggulangi kemiskinan, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ekonomi sudah menunjukkan keadaan yang lebih baik, walaupun masih memerlukan perhatian khusus dengan beberapa indikator utama harus menjadi catatan khusus agar dapat diperbaiki di masa mendatang.

6.3. Prioritas Bidang Intervensi

Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKKP) Daerah Kabupaten OKU Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila dibandingkan dengan rasio dokter, rasio bidan dan jarak puskesmas terdekat maka nilai ini cukup relevan karena keduanya fluktuatif dan makin bertambah. Dengan demikian, untuk menurunkan angka morbiditas dan meningkatkan persentase kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan dapat diselesaikan dengan meningkatkan rasio dokter, rasio bidan dan jarak puskesmas terdekat.

2. Untuk memperbaiki angka partisipasi kasar dapat diselesaikan dengan mengurangi angka putus sekolah usia 7-12 tahun, mengurangi angka buta huruf usia 0-15 tahun dan mengurangi jarak SD/MI terdekat.
3. Untuk menurunkan angka morbiditas dapat diselesaikan dengan meningkatkan angka proporsi rumah tangga dengan air minum layak, angka proporsi rumah tangga dengan akses listrik dan angka proporsi desa dengan akses jalan.

6.4. Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, kedepannya kesalahan dan hambatan diatas harus segera dikoreksi dan dicarikan solusinya, salah satunya adalah dengan mengerahkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah, Provinsi maupun Nasional, disamping itu harapan kedepan kiranya pemberian kewenangan kepada daerah di iringi dengan pendelegasian pembiayaan yang lebih proporsional, sehingga daerah dapat lebih leluasa melakukan percepatan pembangunan yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan.

6.5. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten OKU Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lahan tidur dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin.

2. Pemanfaatan lahan perkebunan hendaknya tidak diserahkan kepada pihak perusahaan, akan tetapi diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan hanya menyiapkan perusahaan pengolahan saja dan kemitraan dijalankan dengan lebih manusiawi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Menjalankan dengan sungguh-sungguh program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk kepentingan masyarakat.
4. Memberikan kemudahan persyaratan dalam memberikan pinjaman pada usaha kecil menengah dan koperasi.
5. Penggalangan dana dari masyarakat berupa zakat, maupun sumbangan lainnya untuk menyediakan dana abadi kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus dimonitor dan dievaluasi tingkat keberhasilannya serta usaha yang dijalankan seyogyanya sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.
7. Program bantuan yang dikhususkan untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat OKU Selatan yang mayoritas petani agar tepat sasaran seperti bantuan pupuk, bibit tanaman, bibit ikan, alsintan dan bibit hewan ternak.